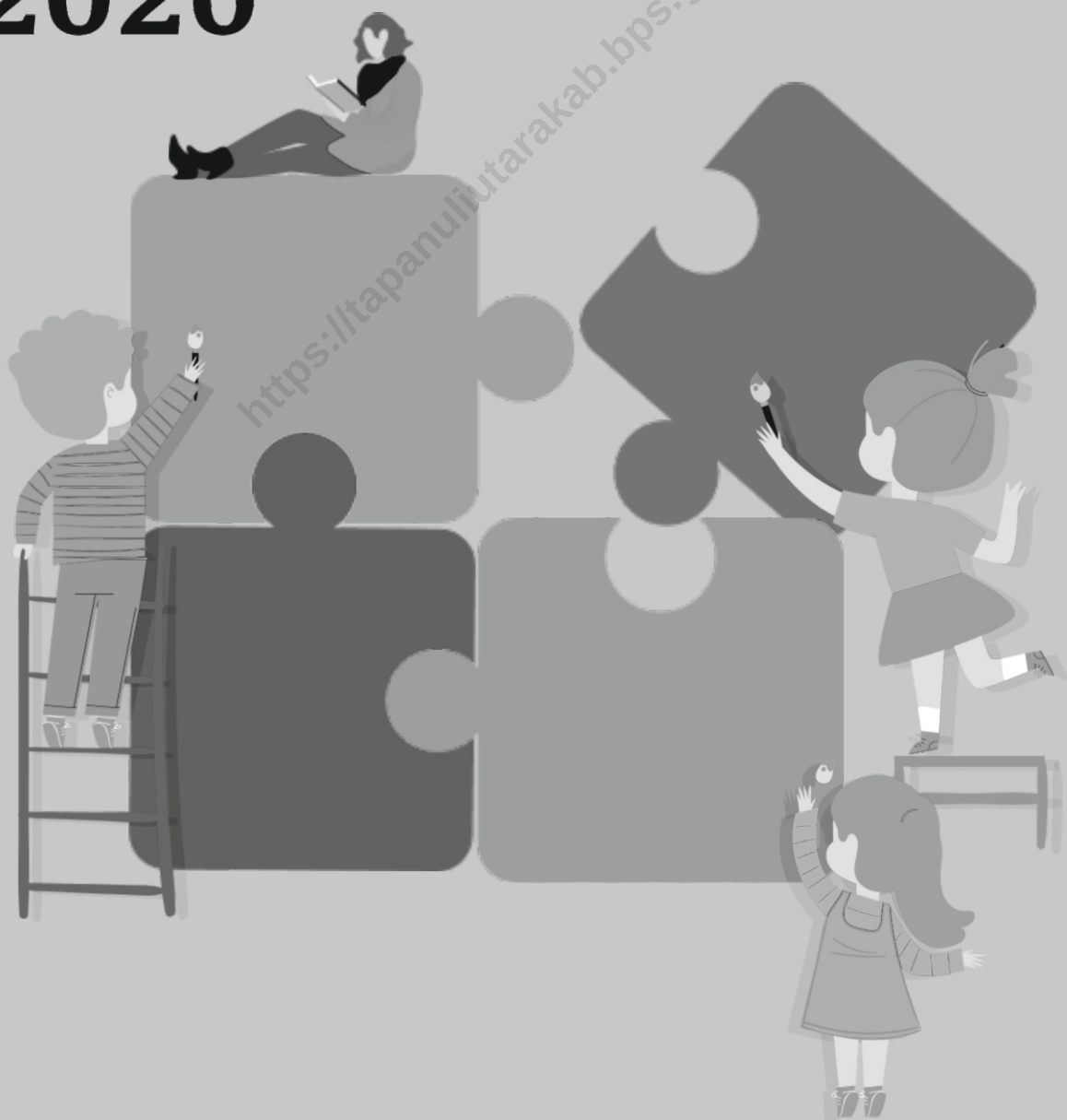


INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN TAPANULI UTARA 2020



BADAN PUSAT STATISTIK
Kabupaten Tapanuli Utara

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN TAPANULI UTARA 2020



IPM

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020

ISSN : 2503-0191
No. Katalog : 4102002.1205
No. Publikasi : 12050.1923
Ukuran Buku : 17,2 cm x 25 cm
Halaman Buku : xii + 73 halaman

Penyusun Naskah :

Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik
Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Utara

Penyunting :

Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik
Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Utara

Gambar Kulit :

Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik
Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Utara

Ilustrasi Gambar Kulit :

www.freepik.com

Diterbitkan Oleh:

© Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Utara

Dicetak Oleh:

CV. Rahmat

“Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik”

Tim Penyusun

Penanggung Jawab Umum:

Ir. Ester Sitorus

Penanggung Jawab Teknis:

Eva Julieta Tamba, SST., M.I.Kom.

Editor:

Eva Julieta Tamba, SST., M.I.Kom.

Josua Johan Pandapotan Sipayung, SST., M.T.

Penulis dan Pengolah Data:

Martha Elwysefia Sianturi, S.Tr.Stat.

Infografis:

Martha Elwysefia Sianturi, S.Tr.Stat.

Desain Cover:

Martha Elwysefia Sianturi, S.Tr.Stat.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas selesainya publikasi **"INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2020"**. Publikasi ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan data statistik, khususnya data mengenai kualitas sumber daya manusia Kabupaten Tapanuli Utara.

Diharapkan dengan terbitnya publikasi ini, para peneliti, akademisi, dan pemakai data pada umumnya serta pemerintah dapat memanfaatkannya baik sebagai bahan evaluasi maupun bahan perencanaan pembangunan yang berhubungan dengan sumber daya manusia. Kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam mengusahakan terwujudnya publikasi ini, baik langsung maupun tidak langsung, diucapkan terima kasih.

Kami menyadari bahwa publikasi ini masih jauh dari sempurna oleh karena itu kami mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif untuk meningkatkan kualitas data dan penyajiannya di masa mendatang.

Tarutung, Desember 2020
**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN TAPANULI UTARA**

Kepala,



Ir. Ester Sitorus

NIP. 19650911 199303 2 008

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi.....	vii
Daftar Tabel.....	ix
Daftar Gambar.....	xi
I. Gagasan Pembangunan Manusia.....	1
1.1. Ide Dasar	3
1.2. Definisi Pembangunan Manusia	4
1.3. Mengukur Pembangunan Manusia	5
1.4. Manfaat Indeks pembangunan Manusia.....	6
1.5. Sistematika Penulisan.....	7
II. Inovasi Dalam Pengukuran Pembangunan Manusia	9
2.1. Perjalanan Penghitungan IPM	11
2.2. Perubahan Metodologi IPM.....	13
2.3. Komponen IPM.....	19
2.4. Penyusunan IPM	24
III. Kondisi Umum dan Sosial Ekonomi.....	27
3.1. Status Pembangunan Manusia Tapanuli Utara	29
3.2. Posisi Tapanuli Utara	30
3.3. Status Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota	38
IV. Perkembangan IPM.....	41
4.1. Tren Terbaru dalam Pembangunan Manusia: Melalui Lensa IPM.....	43
4.2. Status Pembangunan Manusia	45
4.3. Hidup Lebih Lama, Kesehatan yang Lebih Baik ...	45
4.4. Pendidikan Memperluas Peluang	47
4.5. Kenaikan Standar Hidup	50
V. Perbandingan Pembangunan Manusia Di Kawasan Danau Toba	53
5.1. Gambaran Umum Tapanuli Utara	55
5.2. Perbandingan Pencapaian Pembangunan Manusia Antar Kabupaten/Kota di Kawasan Danau Toba ..	56
5.3. Perbandingan Pembangunan Manusia di Kawasan Danau Toba	69

LAMPIRAN.....

67

<https://tapanuliutarakab.bps.go.id>

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Simulasi Rata-rata Aritmatik dan Rata-rata Geometrik.....	14
Tabel 2.2. Perbedaan Indikator Metode Lama dan Metode Baru UNDP.....	16
Tabel 2.3. Angka Partisipasi Sekolah Menurut Kelompok Komoditi Kebutuhan Pokok sebagai Dasar Penghitungan Daya Beli (PPP).....	23
Tabel 2.4. Nilai Maksimum dan Minimum dari Setiap Komponen IPM	24
Tabel 3.1. Klasifikasi Status Pembangunan Manusia	29
Tabel 4.1. Perubahan Status Pembangunan Manusia Tapanuli Utara, 2015-2020.....	45
Tabel 4.2. Jumlah Sekolah dan Murid Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Tapanuli Utara, 2019/2020.....	49
Tabel 5.1. Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Tapanuli Utara.....	56
Tabel 5.2. Status IPM Kabupaten/Kota di Kawasan Danau Toba, 2020.....	58

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Perjalanan Metodologi Penghitungan IPM di UNDP.....	12
Gambar 2.2. Perbandingan IPM Metode Lama dan metode Baru.....	17
Gambar 3.1. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, 2020.....	31
Gambar 3.2. Usia Harapan Hidup Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, 2020.....	33
Gambar 3.3. Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, 2020.....	35
Gambar 3.4. Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, 2020.....	36
Gambar 3.5. Pengeluaran per kapita (d disesuaikan) Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, 2020 (juta rupiah).....	37
Gambar 3.6. Indeks Pembangunan Manusia Sumatera Utara menurut Kabupaten Kota dan Status Pembangunan Manusia, 2020.....	39
Gambar 3.7. Persentase Status Pembangunan Manusia menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, 2020.....	40
Gambar 4.1. Perkembangan IPM Tapanuli Utara, 2015-2020.....	44
Gambar 4.2. Perkembangan Angka Harapan Hidup Tapanuli Utara, 2015-2020.....	46
Gambar 4.3. Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) Tapanuli Utara, 2015-2020.....	48
Gambar 4.4. Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Tapanuli Utara, 2015-2020.....	49
Gambar 4.5. Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan di Tapanuli Utara, 2015-2020.....	50
Gambar 4.6. Perkembangan Pengeluaran per Kapita per Tahun Tapanuli Utara, 2015-2020 (juta rupiah).....	51
Gambar 5.1. IPM Kabupaten/Kota di Kawasan Danau Toba, 2020.....	57

Gambar 5.2.	Perkembangan Selisih IPM Kabupaten/Kota Tertinggi dengan Terendah di Kawasan Danau Toba, 2015-2020.....	59
Gambar 5.3.	Perkembangan Selisih AHH Kabupaten/Kota Tertinggi dengan Terendah di Kawasan Danau Toba, 2015-2020.....	60
Gambar 5.4.	Perkembangan Selisih HLS dan RLS Kabupaten/Kota Tertinggi dengan Terendah di Kawasan Danau Toba, 2015-2020.....	62
Gambar 5.5.	Perkembangan Selisih Pengeluaran Perkapita Kabupaten/Kota Tertinggi dengan Terendah di Kawasan Danau Toba (juta rupiah), 2015-2020.....	63



GAGASAN PEMBANGUNAN MANUSIA

Tujuan Utama Pembangunan
Memungkinkan rakyat untuk menikmati
umur panjang, sehat, dan menjalankan
kehidupan yang produktif (UNDP)



BAB I

GAGASAN PEMBANGUNAN MANUSIA

1.1 Ide Dasar

“Manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Tujuan utama dari pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi rakyatnya untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif. Hal ini tampaknya merupakan suatu kenyataan yang sederhana, tetapi seringkali terlupakan oleh berbagai kesibukan jangka pendek untuk mengumpulkan harta dan uang”. (Human Development Report 1990).

Kalimat pembuka pada Human Development Report (HDR) edisi pertama yang dipublikasikan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1990 secara jelas menekankan arti pentingnya pembangunan yang berpusat pada manusia. Pembangunan pada dasarnya untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk secara keseluruhan dan berkesinambungan. Tujuan akhir pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pentingnya pembangunan yang berpusat pada manusia, yang menempatkan manusia sebagai tujuan akhir, bukan sebagai alat pembangunan, karena manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya.

Pembangunan manusia berarti pertumbuhan yang positif dan perubahan dalam tingkat kesejahteraan. Kebijakan pembangunan yang tidak memperhatikan peningkatan kesejahteraan manusia, akan membuat suatu daerah tertinggal dari daerah lain. Dengan demikian, peningkatan kesejahteraan manusia akan memberikan manfaat dan mengurangi ketimpangan antar daerah.

Konsep pembangunan manusia tersebut pada dasarnya mencakup dimensi pembangunan yang sangat luas. Lebih luas dari definisi pembangunan yang hanya menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi. Menurut *United Nation Development Program* (UNDP), pembangunan manusia salah satunya berupa suatu proses untuk

memperbesar pilihan-pilihan bagi manusia (*"a process of enlarging people's choices"*). Dalam konsep pembangunan manusia, pembangunan seharusnya dianalisis serta dipahami dari sudut manusianya, bukan hanya dari pertumbuhan ekonominya.

Keberhasilan pembangunan manusia dapat dilihat dari seberapa besar permasalahan mendasar di masyarakat yang dapat teratasi. Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain meliputi kemiskinan dan pengangguran serta ketiadaan akses terhadap fasilitas pendidikan dan kesehatan. Keberhasilan pembangunan manusia juga harus dapat diukur. Berbagai ukuran pembangunan manusia telah dibuat namun tidak semuanya dapat digunakan sebagai ukuran standar yang dapat berlaku di semua wilayah atau negara.

1.2 Definisi Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia adalah proses perluasan pilihan masyarakat. Pada prinsipnya, pilihan manusia sangat banyak jumlahnya dan berubah setiap saat. Tiga pilihan yang paling mendasar, yaitu untuk berumur panjang dan hidup sehat, memperoleh pendidikan dan memiliki akses terhadap sumber-sumber kebutuhan agar hidup secara layak. Selain tiga pilihan dasar tersebut, juga terdapat pilihan lainnya atau pilihan tambahan. Pilihan tambahan, mulai dari politik, kebebasan ekonomi dan sosial sehingga memiliki peluang untuk menjadi kreatif dan produktif, dan menikmati harga diri pribadi dan jaminan hak asasi manusia.

Pembangunan manusia memiliki dua sisi. Pertama, pembentukan kapabilitas manusia seperti peningkatan kesehatan, pendidikan, dan kemampuan. Kedua, penggunaan kapabilitas yang mereka miliki, seperti untuk menikmati waktu luang, tujuan produktif atau aktif dalam kegiatan budaya, sosial, dan urusan politik. Apabila skala pembangunan manusia tidak seimbang, kemungkinan akan terjadi ketidakstabilan.

Berdasarkan konsep pembangunan manusia, pendapatan merupakan salah satu pilihan yang harus dimiliki. Akan tetapi, pembangunan bukan sekadar perluasan

pendapatan dan kesejahteraan. Pembangunan manusia harus memfokuskan pada manusia (*HDR 1990 halaman 10*).

1.3 Mengukur Pembangunan Manusia

Keberhasilan pembangunan diukur dengan beberapa parameter, yang populer dengan pembangunan manusia. Dalam sistem pengukuran dan monitoring pembangunan manusia, idealnya mencakup variabel inti untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif. Variabel tersebut menerangkan sebagian besar data/indikator yang menjadi perhatian penting dalam pengukuran pembangunan manusia.

Pengukuran pembangunan manusia pertama kali diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990. UNDP memperkenalkan sebuah gagasan baru dalam pengukuran pembangunan manusia yang disebut sebagai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Indeks (HDI)*. Alat ukur ini diluncurkan oleh *Mahbub ul Haq* dalam bukunya yang berjudul *Reflections on Human Development* (1995), dan telah disepakati dunia melalui *United Nation Development Programe* (UNDP).

Menurut UNDP, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup:

1. umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*);
2. pengetahuan (*knowledge*); dan
3. standar hidup layak (*decent standard of living*).

Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Pada laporan pertamanya, UNDP mengukur dimensi kesehatan dengan menggunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan angka melek huruf. Adapun untuk mengukur

dimensi standar hidup layak digunakan indikator Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita.

1.4 Manfaat Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia menjadi salah satu indikator yang penting dalam melihat sisi lain dari pembangunan. Manfaat penting IPM antara lain sebagai berikut:

- IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk).
- IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara.
- Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

Dalam meningkatkan kesejahteraan manusia, yang dicerminkan dari capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terdapat beberapa strategi yang dapat dikembangkan. Strategi tersebut yaitu peningkatan pendapatan perkapita yang sekaligus penurunan angka kemiskinan dan pengangguran melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas (melalui percepatan investasi). Strategi bidang pendidikan, yang dapat dikembangkan yaitu peningkatan kualitas pendidikan masyarakat yang didukung oleh pemantapan pelaksanaan pendidikan formal, mulai dari pendidikan anak usia dini sampai wajib belajar 12 tahun. Strategi lainnya yaitu pengembangan lembaga jaminan sosial, peningkatan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, peningkatan kesetaraan gender, perlindungan anak, penurunan kesenjangan antar daerah serta pengendalian pertumbuhan penduduk.

Indeks Pembangunan Manusia merupakan salah satu indikator yang dapat memberikan gambaran umum dari pencapaian pembangunan dan penentuan prioritas-prioritasnya yang dicapai oleh suatu wilayah. Pencapaian pembangunan

yang dimaksud adalah pembangunan yang berwawasan manusia yaitu pembangunan yang bertujuan untuk memperluas peluang. Hal ini sejalan dengan prioritas pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara yang salah satunya adalah kesejahteraan masyarakat yang komponen-komponennya meliputi tingkat pendidikan, pendapatan perkapita, tenaga kerja (*employment*), kesehatan dan lain-lain.

1.5 Sistematika Penulisan

Publikasi ini secara umum menyajikan data dan analisis IPM Tapanuli Utara metode baru selama periode 2015-2019, baik Kabupaten Tapanuli Utara maupun menurut kabupaten/kota. Untuk melihat perkembangan IPM secara lebih utuh, menyajikan kondisi sosial ekonomi, perkembangan IPM dan komponennya, kemajuan pembangunan manusia dan disparitas pembangunan manusia antar wilayah di Kawasan Danau Toba, Sumatera Utara.

Publikasi ini terdiri dari lima bab. Bab 1 menyajikan ide dasar penulisan yang menguraikan manfaat peningkatan kualitas modal manusia dalam pembangunan daerah. Inovasi dalam pengukuran pembangunan manusia akan disajikan pada Bab 2, yaitu bab yang menguraikan tentang perubahan metodologi IPM metode baru. Selanjutnya pada Bab 3 akan disajikan status pembangunan manusia Tapanuli Utara. Kemajuan pembangunan Tapanuli Utara akan disajikan pada Bab 4 beserta analisis dan pembahasan secara deskriptif. Terakhir, Bab 5 yang menguraikan disparitas pembangunan manusia di Kawasan Danau Toba, Sumatera Utara.



INOVASI DALAM PENGUKURAN PEMBANGUNAN MANUSIA

KOMPONEN IPM



ANGKA
HARAPAN
HIDUP

HARAPAN
LAMAA
SEKOLAH

STANDAR
HIDUP
LAYAK

RATA-RATA
LAMAA
SEKOLAH



BAB II

INOVASI DALAM PENGUKURAN PEMBANGUNAN MANUSIA

2.1. Perjalanan Penghitungan IPM

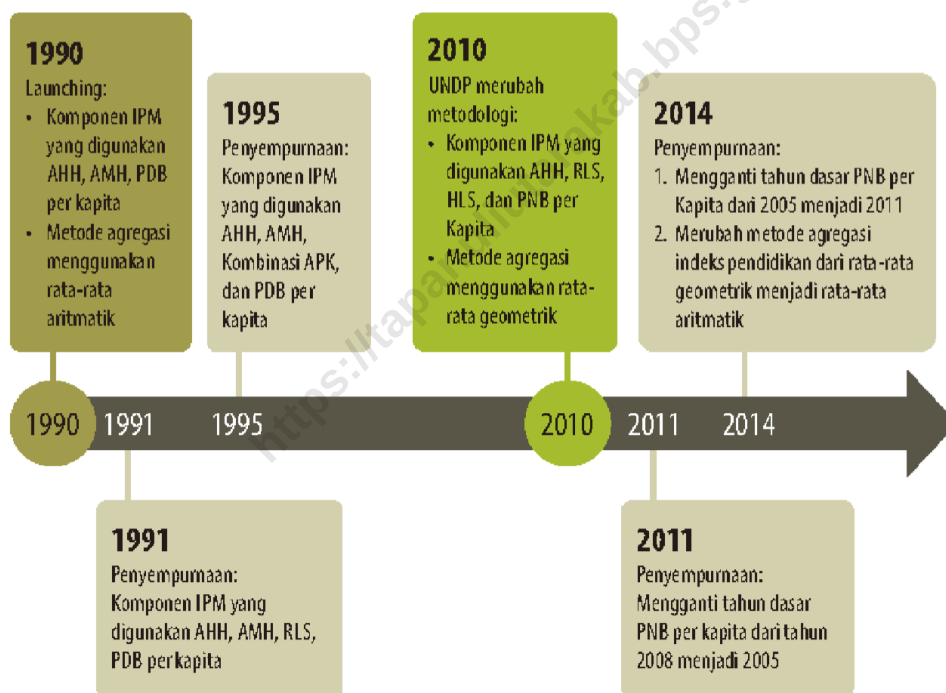
Sejak pertama kali diperkenalkan oleh UNDP, IPM terus mendapat banyak sorotan. Banyak dukungan yang mengalir, tetapi tidak sedikit kritikan terhadap indikator ini. Sebagian pihak berpendapat bahwa indikator yang tercakup di dalam IPM kurang mewakili pembangunan. Para pakar terus bekerja untuk mendalami lebih jauh tentang pembangunan manusia. Mereka terus melakukan kajian untuk menyempurnakan penghitungan IPM. Hal itu terutama dilakukan pada indikator yang digunakan dalam penghitungan IPM. Tercatat bahwa UNDP melakukan dua kali penyempurnaan pada tahun 1991 dan 1995 dan perubahan di tahun 2010.

Awalnya, UNDP memperkenalkan suatu indeks komposit yang mampu mengukur pembangunan manusia. Ketika diperkenalkan pada tahun 1990, mereka menyebutnya sebagai Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*) yang kemudian secara rutin dipublikasikan setiap tahun dalam Laporan Pembangunan Manusia (*Human Development Report*). Kala itu, IPM dihitung melalui pendekatan dimensi umur panjang dan hidup sehat yang diproksi dengan angka harapan hidup saat lahir, dimensi pengetahuan yang diproksi dengan angka melek huruf dewasa, serta dimensi standar hidup layak yang diproksi dengan PDB per kapita. Untuk menghitung ketiga dimensi menjadi sebuah indeks komposit, digunakan rata-rata aritmatik.

Setahun berselang, UNDP melakukan penyempurnaan penghitungan IPM dengan menambahkan variabel rata-rata lama sekolah ke dalam dimensi pengetahuan. Akhirnya, terdapat dua indikator dalam dimensi pengetahuan yaitu angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Karena terdapat dua indikator dalam dimensi pengetahuan, UNDP memberi bobot untuk keduanya. Indikator angka

melek huruf diberi bobot dua per tiga, sementara indikator rata-rata lama sekolah diberi bobot sepertiga. Hingga tahun 1994, keempat indikator yang digunakan dalam penghitungan IPM masih cukup relevan. Namun akhirnya, pada tahun 1995 UNDP kembali melakukan penyempurnaan metode penghitungan IPM. Kali ini, UNDP mengganti variabel rata-rata lama sekolah menjadi gabungan angka partisipasi kasar. Pembobotan tetap dilakukan dengan metode yang sama seperti sebelumnya.

Gambar 2.1 Perjalanan Metodologi Penghitungan IPM di UNDP



Catatan:

AHH : Angka Harapan Hidup saat Lahir
AMH : Angka Melek Huruf
RLS : Rata-rata Lama Sekolah
PDB : Produk Domestik Bruto

APK : Angka Partisipasi Kasar
HLS : Harapan Lama Sekolah
PNB : Produk Nasional Bruto

Pada tahun 2010, UNDP merubah metodologi penghitungan IPM. Kali ini perubahan drastis terjadi pada penghitungan IPM. UNDP menyebut perubahan yang dilakukan pada penghitungan IPM sebagai metode baru. Beberapa indikator diganti menjadi lebih relevan. Indikator Angka Partisipasi Kasar gabungan (*Combine Gross Enrollment Ratio*) diganti dengan indikator Harapan Lama Sekolah (*Expected Years of Schooling*). Indikator Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita diganti dengan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita. Selain itu, cara penghitungan juga ikut berubah. Metode rata-rata aritmatik diganti menjadi rata-rata geometrik untuk menghitung indeks komposit.

Perubahan yang dilakukan UNDP tidak hanya sebatas itu. Setahun kemudian, UNDP menyempurnakan penghitungan metode baru. UNDP merubah tahun dasar penghitungan PNB per kapita dari 2008 menjadi 2015. Tiga tahun berselang, UNDP melakukan penyempurnaan kembali penghitungan metode baru. Metode agregasi indeks pendidikan diubah dari rata-rata geometrik menjadi rata-rata aritmatik dan tahun dasar PNB per kapita. Serangkaian perubahan yang dilakukan UNDP bertujuan untuk membuat suatu indeks komposit yang cukup relevan dalam mengukur pembangunan manusia.

2.2. Perubahan Metodologi IPM

Pada dasarnya, perubahan metodologi penghitungan IPM didasarkan pada alasan yang cukup rasional. Suatu indeks komposit harus mampu mengukur apa yang diukur. Dengan pemilihan metode dan variabel yang tepat, indeks yang dihasilkan akan cukup relevan. Alasan utama yang dijadikan dasar perubahan metodologi penghitungan IPM diperkuat oleh dua hal mendasar. **Pertama**, beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam penghitungan IPM.

Angka Melek Huruf (AMH) sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Sebelum

penghitungan metode baru digunakan, AMH di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antarwilayah dengan baik. Dalam konsep pembentukan indeks komposit, variabel yang tidak sensitif membedakan akan menyebabkan indikator komposit menjadi tidak relevan. Oleh karena itu, indikator AMH dianggap sudah tidak relevan sebagai komponen dalam penghitungan IPM.

Selanjutnya adalah indikator PDB per kapita. Indikator ini pada dasarnya merupakan proksi terhadap pendapatan masyarakat. Namun disadari bahwa PDB diciptakan dari seluruh faktor produksi dan apabila ada investasi dari asing turut diperhitungkan. Padahal, tidak seluruh pendapatan faktor produksi dinikmati penduduk lokal. Oleh karena itu, PDB per kapita kurang dapat menggambarkan pendapatan masyarakat atau bahkan kesejahteraan masyarakat pada suatu wilayah.

Kedua, penggunaan rumus rata-rata aritmatik dalam penghitungan IPM menggambarkan bahwa capaian yang rendah di suatu dimensi dapat ditutupi oleh capaian tinggi dari dimensi lain. Pada dasarnya, konsep yang diusung dalam pembangunan manusia adalah pemerataan pembangunan dan sangat anti terhadap ketimpangan pembangunan. Rata-rata aritmatik memungkinkan adanya transfer capaian dari dimensi dengan capaian tinggi ke dimensi dengan capaian rendah. Perumpamaan sederhana untuk dapat melihat kelemahan rata-rata aritmatik misalnya dengan menghitung secara sederhana nilai ketiga dimensi pembangunan manusia.

Tabel 2.1 Simulasi Rata-rata Aritmatik dan Rata-rata Geometrik

Kesehatan	Pendidikan	Standar Hidup Layak	Rata-rata Aritmatik	Rata-rata Geometrik
3	3	3	3,00	3,00
2	3	4	3,00	2,88
1	3	5	3,00	2,47

Misal, capaian dimensi umur panjang dan sehat, dimensi pengetahuan, dan dimensi standar hidup masing-masing adalah 3, 3, dan 3. Dengan rata-rata aritmatik dapat diperoleh dengan mudah bahwa rata-rata ketiga dimensi adalah $(3 + 3 + 3) / 3 = 3$. Pada contoh kasus lain, misalkan capaian ketiga dimensi berturut-turut adalah 2, 3, dan 4. Rata-rata ketiga dimensi juga masih 3, yaitu $(2 + 3 + 4) / 3 = 3$. Padahal secara nyata terlihat bahwa ada ketimpangan capaian antardimensi pembangunan manusia.

Pada kasus yang lebih ekstrim, rata-rata aritmatik mampu menutupi ketimpangan pembangunan manusia yang terjadi di suatu wilayah. Misal, capaian ketiga dimensi secara berturut-turut menjadi 1, 3, dan 5. Dalam kondisi ketimpangan yang ekstrim ini, rata-rata pembangunan manusia tetap 3. Kondisi ini sama dengan capaian suatu wilayah pada contoh kasus pertama. Rata-rata aritmatik menyebabkan seolah-olah tidak terjadi ketimpangan karena hasil dapat ditutupi oleh dimensi yang lebih tinggi capaiannya. Kelemahan rata-rata aritmatik ini menjadi salah satu alasan mendasar untuk memperbarui metode penghitungan IPM.

UNDP memperkenalkan penghitungan IPM metode baru dengan beberapa perbedaan mendasar dibanding metode lama. Setidaknya, terdapat dua hal mendasar dalam perubahan metode baru ini. Kedua hal mendasar terdapat pada aspek indikator dan cara penghitungan indeks.

Pada metode baru, UNDP memperkenalkan indikator baru pada dimensi pengetahuan yaitu Harapan Lama Sekolah (*Expected Years of Schooling*). Indikator ini digunakan untuk menggantikan indikator AMH yang memang saat ini sudah tidak relevan karena capaian di banyak negara sudah sangat tinggi. UNDP juga menggunakan indikator PNB per kapita untuk menggantikan indikator PDB per kapita.

Tabel 2.2 Perbedaan Indikator Metode Lama dan Metode Baru UNDP

Dimensi	Metode Lama	Metode Baru
Umur Panjang dan Hidup Sehat	Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)	Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)
Pengetahuan	• Angka Melek Huruf (AMH) • Kombinasi Angka Partisipasi Kasar (APK)	• Harapan Lama Sekolah (HLS) • Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
Standar Hidup Layak	PDB per Kapita	PNB per Kapita

Selain indikator baru, UNDP melakukan perubahan cara penghitungan indeks. Pada metode lama, agregasi indeks komposit menggunakan rata-rata aritmatik. Berbeda pada metode baru menggunakan rata-rata geometrik (*geometric mean*). Cara penghitungan indeks yang terbilang baru ini cenderung sensitif terhadap ketimpangan. Tidak seperti rata-rata aritmatik yang dapat menutupi ketimpangan yang terjadi antardimensi, rata-rata geometrik menuntut keseimbangan ketiga dimensi IPM agar capaian IPM menjadi optimal. Metode agregasi indeks komposit yang digunakan pada metode baru merupakan penyempurnaan metode lama.

Gambar 2.2 Perbandingan IPM Metode Lama dan metode Baru



Perubahan mendasar yang terjadi pada penghitungan IPM tentunya membawa dampak. Secara langsung, ada dua dampak yang terjadi akibat perubahan metode penghitungan IPM. **Pertama**, perubahan level IPM. Secara umum, level IPM metode baru lebih rendah dibanding IPM metode lama. Hal ini terjadi karena perubahan indikator dan perubahan cara penghitungan. Penggantian indikator Angka Melek Huruf (AMH) menjadi Harapan Lama Sekolah (HLS) membuat angka IPM lebih rendah karena secara umum AMH sudah di atas 90 persen sementara HLS belum cukup optimal. Selain itu, perubahan rata-rata aritmatik menjadi rata-rata geometrik juga turut andil dalam penurunan level IPM metode baru. Ketimpangan yang terjadi antardimensi akan mengakibatkan capaian IPM menjadi rendah.

Kedua, terjadi perubahan peringkat IPM. Perubahan indikator dan cara penghitungan membawa dampak pada perubahan peringkat IPM. Perubahan indikator berdampak pada perubahan indeks dimensi. Sementara perubahan cara penghitungan berdampak signifikan terhadap agregasi indeks. Namun, perlu dicatat bahwa peringkat IPM antara kedua metode tidak dapat dibandingkan karena kedua metode tidak sama.

Pada tahun 2014, Indonesia secara resmi melakukan penghitungan IPM dengan metode baru. Untuk mengaplikasikan metode baru, sumber data yang tersedia di Indonesia, yaitu:

- Angka harapan hidup saat lahir (Sensus Penduduk 2010/SP2010, Proyeksi Penduduk)
- Angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah (Survei Sosial Ekonomi Nasional/SUSENAS)

- PNB per kapita tidak tersedia pada tingkat provinsi dan kabupaten/ kota, sehingga diproksi dengan pengeluaran per kapita disesuaikan menggunakan data SUSENAS.

Indonesia melakukan beberapa penyesuaian terhadap metode baru. Penyesuaian ini dilakukan pada indikator PNB per kapita karena masalah ketersediaan data. Dari empat indikator yang digunakan dalam penghitungan IPM metode baru, tiga diantaranya sama persis dengan UNDP. Khusus untuk PNB per kapita, indikator ini diproksi dengan pengeluaran per kapita.

2.3. Komponen IPM

a. Angka Harapan Hidup saat Lahir

Sebenarnya cukup banyak indikator yang dapat digunakan untuk mengukur dimensi umur panjang dan sehat, namun dengan mempertimbangkan ketersediaan data secara umum, maka UNDP memilih indikator Angka Harapan Hidup waktu lahir (*life expectancy at birth*) sebagai salah satu komponen untuk penghitungan IPM. Angka harapan hidup saat lahir (AHH) merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Penghitungan angka harapan hidup melalui pendekatan tak langsung (*indirect estimation*).

Jenis data yang digunakan adalah Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH). Paket program *Mortpack* digunakan untuk menghitung angka harapan hidup berdasarkan input data ALH dan AMH. Selanjutnya, dipilih metode *Trussel* dengan model *West*, yang sesuai dengan histori kependudukan dan kondisi Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara umumnya (Preston, 2004). Indeks harapan hidup dihitung dengan menghitung nilai maksimum dan nilai minimum harapan hidup sesuai standar UNDP, yaitu angka tertinggi sebagai batas atas untuk penghitungan indeks dipakai 85 tahun dan terendah adalah 20 tahun.

Indikator angka harapan hidup saat lahir tidak mengalami perubahan pada metode baru. Akan tetapi, sumber data yang digunakan dalam penghitungan indikator ini telah diperbarui dengan menggunakan hasil Sensus Penduduk tahun 2010 (SP2010). Indikator ini menjadi indikator penting untuk melihat derajat kesehatan suatu masyarakat. Indikator ini tetap dipertahankan keberadaannya karena selain relevansinya, juga ketersediaan data hingga tingkat kabupaten/kota cukup memadai.

b. Tingkat Pendidikan

Salah satu komponen pembentuk IPM adalah dari dimensi pengetahuan yang diukur melalui tingkat pendidikan. Dalam hal ini, indikator yang digunakan adalah rata-rata lama sekolah (mean years of schooling) dan harapan lama sekolah (expected years of schooling). Indikator harapan lama sekolah merupakan indikator baru menggantikan angka melek huruf. Seperti pada penjelasan sebelumnya, indikator angka melek huruf sudah tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini. Pada proses pembentukan IPM, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah diberi bobot yang sama, kemudian penggabungan kedua indikator ini digunakan sebagai indeks pendidikan sebagai salah satu komponen pembentuk IPM.

b.1. Harapan Lama Sekolah (HLS)

Harapan lama sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Indikator ini dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Seperti halnya rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah juga menggunakan batasan yang dipakai sesuai

kesepakatan UNDP. Batas maksimum untuk harapan lama sekolah adalah 18 tahun, sedangkan batas minimumnya 0 (nol).

b.2. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Indikator rata-rata lama sekolah tetap dipertahankan karena menggambarkan stok yang terjadi pada dunia pendidikan. Namun, cakupan penghitungan yang digunakan pada metode baru telah diganti. Pada metode lama, cakupan penduduk yang dihitung adalah penduduk berusia 15 tahun ke atas. Sementara pada metode baru, cakupan penduduk yang dihitung adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas sesuai dengan rekomendasi UNDP. Selain untuk keterbandingan dengan internasional, alasan penting lain yaitu bahwa pada umumnya penduduk berusia 25 ke atas tidak bersekolah lagi. Walaupun sebagian kecil ada yang masih bersekolah, jumlahnya tidak signifikan. Penduduk usia 25 tahun ke atas merupakan stok pendidikan yang dimiliki oleh suatu wilayah.

Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Penghitungan rata-rata lama sekolah menggunakan dua batasan yang dipakai sesuai kesepakatan UNDP. Rata-rata lama sekolah memiliki batas maksimumnya 15 tahun dan batas minimum sebesar 0 tahun.

c. Standar Hidup Layak

Dimensi lain dari ukuran kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak. Dalam cakupan lebih luas, standar hidup layak menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. UNDP mengukur standar hidup layak menggunakan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita yang disesuaikan. Indikator PNB per kapita lebih menggambarkan kesejahteraan masyarakat dibanding pengeluaran per kapita, namun data ini tidak tersedia hingga tingkat kabupaten/kota. Saat ini BPS masih

menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan dengan paritas daya beli (*purcashing power parity*) berbasis formula Rao.

$$PPP_j = \prod_{i=1}^m \left(\frac{p_{ij}}{p_{ik}} \right)^{\frac{1}{m}} \quad (1)$$

Ada perubahan pada penghitungan paritas daya beli (*purcashing power parity*) yang digunakan. Pada metode lama, terdapat 27 komoditas yang digunakan dalam penghitungan paritas daya beli. Sementara pada metode baru terdapat 96 komoditas yang digunakan. Hal ini dilakukan karena selama 1990 hingga 2014 telah terjadi banyak perubahan pola konsumsi masyarakat sehingga komoditas penghitungan paritas daya beli juga harus diperbarui.

Penghitungan paritas daya beli dilakukan berdasarkan 96 komoditas kebutuhan pokok seperti terlihat dalam Tabel 2.3. Batas maksimum dan minimum penghitungan pengeluaran per kapita yang digunakan dalam penghitungan IPM seperti terlihat dalam Tabel 2.4. Batas maksimum pengeluaran per kapita adalah sebesar Rp 26.572.352 sementara batas minimumnya adalah Rp 1.007.436.

Tabel 2.3 Komoditi Kebutuhan Pokok sebagai Dasar Penghitungan Daya Beli (PPP)

Beras	Pisang lainnya	Rokok kretek tanpa filter
Tepung terigu	Pepaya	Rokok putih
Ketela pohon/singkong	Minyak kelapa	Rumah sendiri/bebas sewa
Kentang	Minyak goreng lainnya	Rumah kontrak
Tongkol/tuna/cakalang	Kelapa	Rumah sewa
Kembung	Gula pasir	Rumah dinas
Bandeng	Teh	Listrik
Mujair	Kopi	Air PAM
Mas	Garam	LPG
Lele	Kecap	Minyak tanah
Ikan segar lainnya	Penyedap masakan/ vetsin	Lainnya (batu baterai,aki, korek,obat nyamuk dll)
Daging sapi	Mie instan	Perlengkapan mandi
Daging ayam ras	Roti manis/roti lainnya	Barang kecantikan
Daging ayam kampung	Kue kering	Perawatan kulit, muka, kuku,rambut
Telur ayam ras	Kue basah	Sabun cuci
Susu kental manis	Makanan gorengan	Biaya RS Pemerintah
Susu bubuk	Gado-gado/ketoprak	Biaya RS Swasta
Susu bubuk bayi	Nasi campur/rames	Puskesmas/pustu
Bayam	Nasi goreng	Praktek dokter/poliklinik
Kangkung	Nasi putih	SPP
Kacang panjang	Lontong/ketupat sayur	Bensin
Bawang merah	Soto/gule/sop/rawon/ cincang	Transportasi/ pengangkutan umum
Bawang putih	Sate/tongseng	Pos dan Telekomunikasi
Cabe merah	Mie bakso/mie rebus/mie goreng	Pakaian jadi laki-laki dewasa
Cabe rawit	Makanan ringan anak	Pakaian jadi perempuan
Tahu	Ikang (goreng/bakar dll)	Pakaian jadi anak-anak
Tempe	Ayam/daging (goreng dll)	Alas kaki
Jeruk	Makanan jadi lainnya	Minyak Pelumas
Mangga	Air kemasan galon	Meubelair
Salak	Minuman jadi lainnya	Peralatan Rumah Tangga
Pisang ambon	Es lainnya	Perlengkapan perabot rumah
Pisang raja	Roko kretek filter	Alat-alat Dapur/Makan

2.4 Penyusunan IPM

Sebelum menghitung IPM, setiap komponen IPM harus dihitung indeksinya. Formula yang digunakan dalam penghitungan indeks komponen IPM adalah sebagai berikut:

$$I_{AHH} = \frac{AHH - AHH_{\min}}{AHH_{\max} - AHH_{\min}} \quad (2)$$

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{\min}}{HLS_{\max} - HLS_{\min}} \quad (3)$$

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{\min}}{RLS_{\max} - RLS_{\min}} \quad (4)$$

$$I_{\text{pengetahuan}} = \frac{I_{HLS} - I_{\min RLS}}{2} \quad (5)$$

$$I_{\text{pengeluaran}} = \frac{\ln(\text{pengeluaran}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\min})}{\ln(\text{pengeluaran}_{\max}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\max\min})} \quad (6)$$

Untuk menghitung indeks masing-masing komponen IPM digunakan batas maksimum dan minimum seperti terlihat dalam Tabel 2.4.

Tabel 2.4 Nilai Maksimum dan Minimum dari Setiap Komponen IPM

Komponen IPM	Satuan	Minimum	Maksimum
Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH)	Tahun	20	85
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	0	18
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	0	15
Pengeluaran per Kapita	Rupiah	1.007.436	26.572.352

Keterangan:

* Daya beli minimum merupakan garis kemiskinan terendah kabupaten tahun 2010 (data empiris) yaitu di Tolikara Papua

** Daya beli maksimum merupakan nilai tertinggi kabupaten yang diproyeksikan hingga 2025 (akhir RPJPN) yaitu perkiraan pengeluaran per kapita Jakarta Selatan tahun 2025

Selanjutnya nilai IPM dapat dihitung sebagai:

$$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \quad (7)$$

Kecepatan perubahan IPM juga menjadi salah satu fokus dalam pembangunan manusia. Untuk mengukur kecepatan perkembangan IPM dalam suatu kurun waktu digunakan ukuran pertumbuhan per tahun. Pada metode lama, kecepatan perubahan IPM diukur dengan menggunakan *reduksi shortfall*. Pada metode baru, kecepatan perubahan IPM diukur dengan menggunakan pertumbuhan aritmatik.

Pertumbuhan IPM menunjukkan perbandingan antara perubahan capaian terkini dengan capaian tahun sebelumnya. Semakin tinggi nilai pertumbuhan IPM, maka semakin cepat pula peningkatan IPM. Indikator pertumbuhan IPM ini dapat digunakan sebagai kinerja pembangunan manusia suatu wilayah pada kurun waktu tertentu.

$$Pertumbuhan\ IPM = \frac{IPM_t - IPM_{t-1}}{IPM_{t-1}} \times 100\% \quad (8)$$

Keterangan:

IPM_t : IPM suatu wilayah pada tahun t

$IPM_{(t-1)}$: IPM suatu wilayah pada tahun $(t-1)$



KONDISI UMUM DAN SOSIAL EKONOMI



HARAPAN LAMA SEKOLAH
KABUPATEN TAPANULI UTARA
TAHUN 2020

13,69
t a h u n



BAB III

STATUS PEMBANGUNAN MANUSIA

3.1 Status Pembangunan Manusia Tapanuli Utara

Sebagai indikator komposit, jika IPM disajikan tersendiri maka hanya dapat menunjukkan status pembangunan manusia suatu wilayah. Manfaat IPM dapat diperluas jika dilakukan perbandingan antar waktu dan antar wilayah. Kemajuan atau pencapaian IPM antar waktu di suatu wilayah seperti kabupaten atau provinsi serta perbandingannya dengan pencapaian di wilayah lain juga dapat dianalisis.

Capaian pembangunan manusia di suatu wilayah pada waktu tertentu dapat dikelompokkan ke dalam empat kelompok. Pengelompokan ini bertujuan untuk mengorganisasikan wilayah-wilayah menjadi kelompok-kelompok yang sama dalam hal pembangunan manusia.

Tabel 3.1 Klasifikasi Status Pembangunan Manusia

Nilai IPM	Status Pembangunan Manusia
< 60	Rendah
$60 \leq \text{IPM} < 70$	Sedang
$70 \leq \text{IPM} < 80$	Tinggi
≥ 80	Sangat Tinggi

Sumber: BPS Kabupaten Tapanuli Utara

Indeks Pembangunan Manusia Tapanuli Utara mencapai 73,47 pada tahun 2020. Dengan capaian IPM itu, Tapanuli Utara berada pada posisi status pembangunan manusia kategori “tinggi” sama dengan tahun sebelumnya. Tapanuli Utara berada pada posisi kesepuluh dari 33 kabupaten/kota dalam pencapaian pembangunan manusia di Sumatera Utara.

Capaian IPM merupakan agregasi dari tiga dimensi yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Dimensi umur panjang dan hidup sehat diwakili oleh indikator angka harapan hidup saat lahir. Rata-rata bayi

yang baru lahir dapat bertahan hidup di Tapanuli Utara pada tahun 2020 mencapai usia 68,63 tahun.

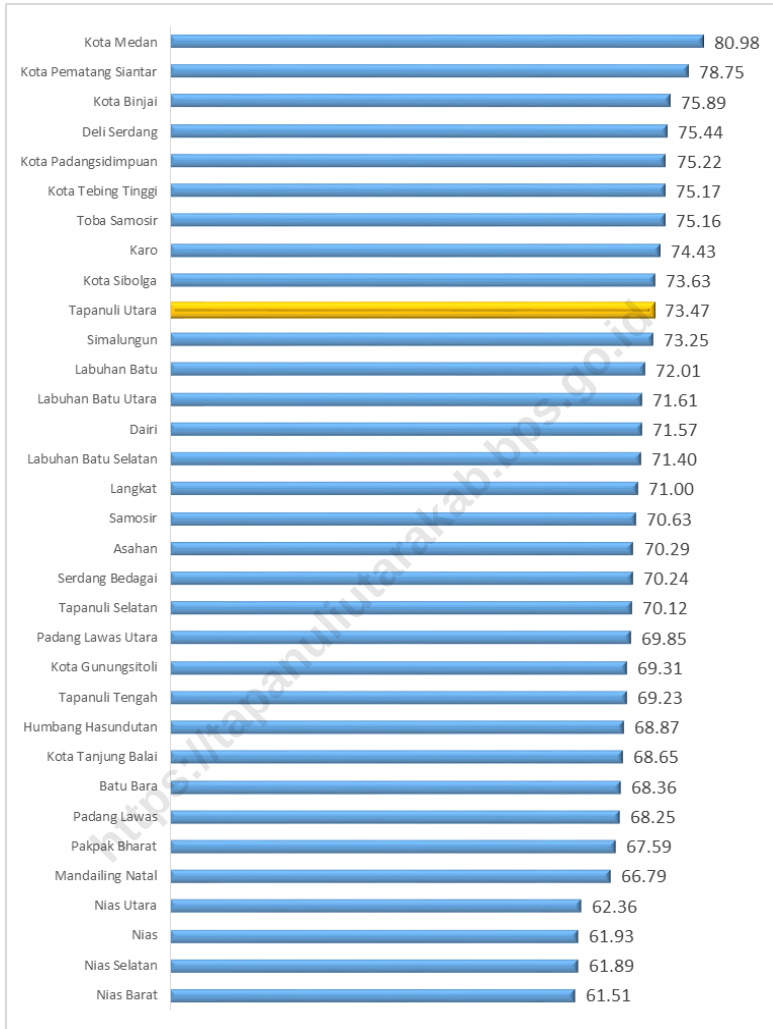
Dimensi pengetahuan diwakili oleh indikator rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Secara rata-rata, penduduk 25 tahun ke atas di Tapanuli Utara telah menempuh pendidikan hingga 9,85 tahun atau setara dengan mencapai SMA kelas I. Sementara anak berusia 7 tahun yang masuk dunia pendidikan diharapkan mampu bersekolah hingga 13,69 tahun atau mencapai Diploma II.

Tidak kalah penting yaitu dimensi standar hidup layak yang diukur melalui indikator rata-rata pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Daya beli masyarakat mencerminkan kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang maupun jasa. Rata-rata pengeluaran per kapita disesuaikan Tapanuli Utara sebesar 11,648 juta rupiah per tahun.

3.2 Posisi Tapanuli Utara

Indeks Pembangunan Manusia di Tapanuli Utara pada tahun 2020 telah mencapai 73,47 dan sudah berstatus “tinggi”. Pada tingkat kabupaten/kota, capaian pembangunan manusia cukup bervariasi. Capaian pembangunan manusia tertinggi berada di Kota Medan dengan IPM sebesar 80,98. Sementara capaian pembangunan manusia terendah berada di Kabupaten Nias Barat sebesar 61,51.

Gambar 3.1 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, 2020



Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Utara

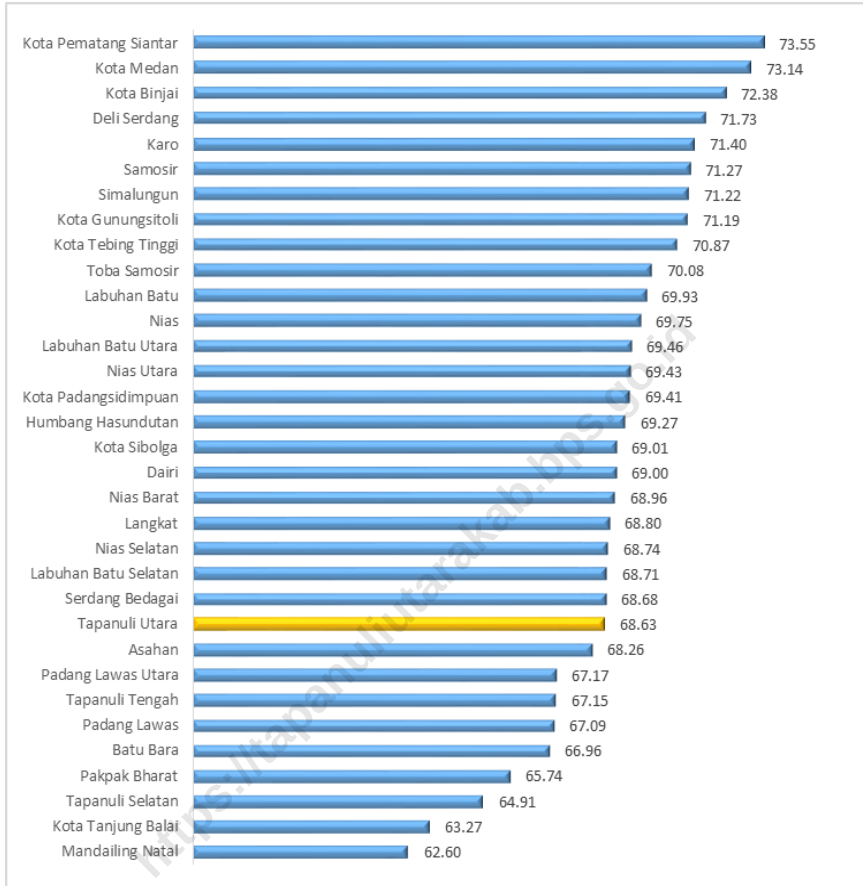
IPM Tapanuli Utara tahun 2020 lebih rendah dibanding sembilan kabupaten/kota lain seperti Medan, Pematang Siantar, Binjai dan seterusnya seperti ditunjukkan gambar 3.1. Di tingkat kabupaten/kota, Tapanuli Utara menduduki rangking ke-10, dan angka IPM tersebut sedikit di atas angka Provinsi Sumatera Utara yang sebesar 71,77.

a. Usia Harapan Hidup

Dimensi umur panjang dan hidup sehat diwakili oleh indikator usia harapan hidup (UHH) saat lahir. Usia harapan hidup Tapanuli Utara tahun 2020 yaitu 68,63 tahun, masih berada di bawah angka Provinsi Sumatera Utara yang sebesar 69,10 tahun. UHH Tapanuli Utara berada di urutan 24 pada tingkat kabupaten/kota di Sumatera Utara.

Usia harapan hidup (AHH) tertinggi di Sumatera Utara yaitu Kota Pematang Siantar yang mencapai 73,55 tahun. Sedangkan UHH paling rendah adalah Kabupaten Mandailing Natal yaitu 62,60 tahun. UHH Tapanuli Utara tergolong kondisi yang perlu perhatian lebih karena berada pada posisi menengah ke bawah.

Gambar 3.2 Usia Harapan Hidup Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, 2020



Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Utara

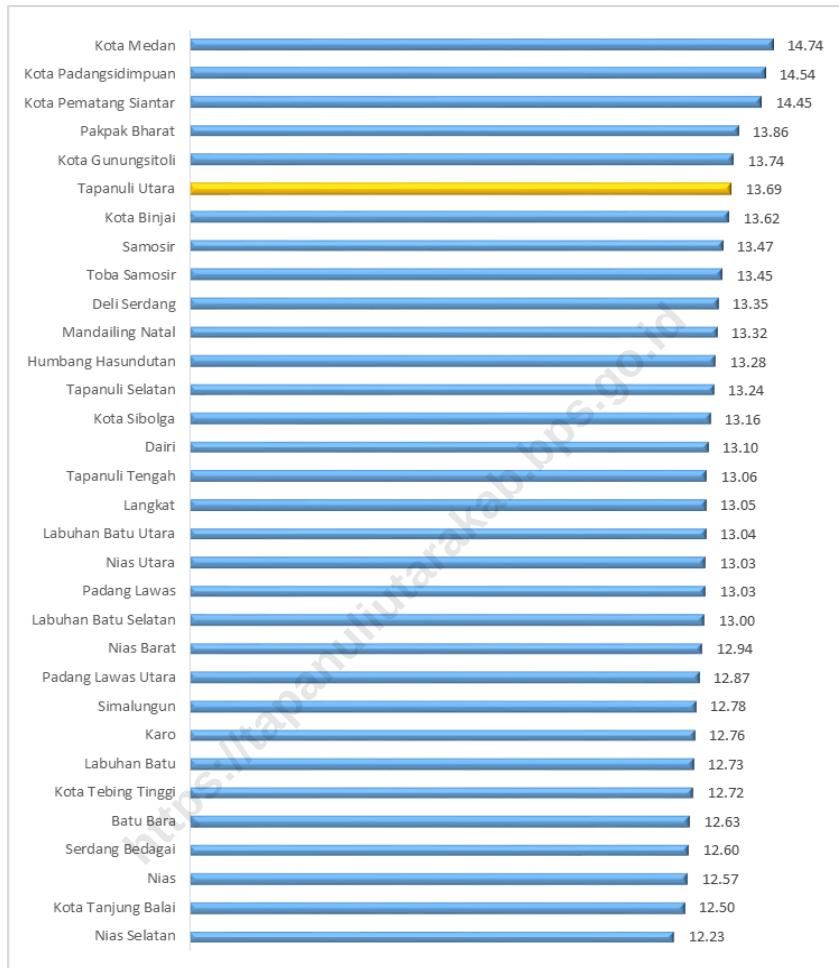
b. Harapan dan Rata-rata Lama Sekolah

Dimensi pengetahuan diwakili oleh indikator rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah (HLS). Harapan Lama Sekolah Tapanuli Utara mencapai 13,69 tahun. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara berhasil meningkatkan Harapan Lama Sekolah hingga dapat berada di atas HLS Provinsi Sumatera Utara yang mencapai 13,23 tahun.

Dibandingkan kabupaten/kota lain di Provinsi Sumatera Utara, harapan lama sekolah Tapanuli Utara tahun 2020 menduduki peringkat ke 6 atau peringkat ke 28 dari bawah, HLS tertinggi di Kota Medan mencapai 14,74 tahun, sedangkan HLS terendah di Kabupaten Nias Selatan yang hanya 12,23 tahun.

Masih dalam dimensi pengetahuan, rata-rata penduduk usia 25 tahun keatas di Tapanuli Utara bersekolah selama 9,85 tahun atau mencapai SMA kelas I pada tahun 2020. Rata-rata lama sekolah (RLS) di Tapanuli Utara sudah berada di atas RLS Provinsi Sumatera Utara yang mencapai 9,54 tahun.

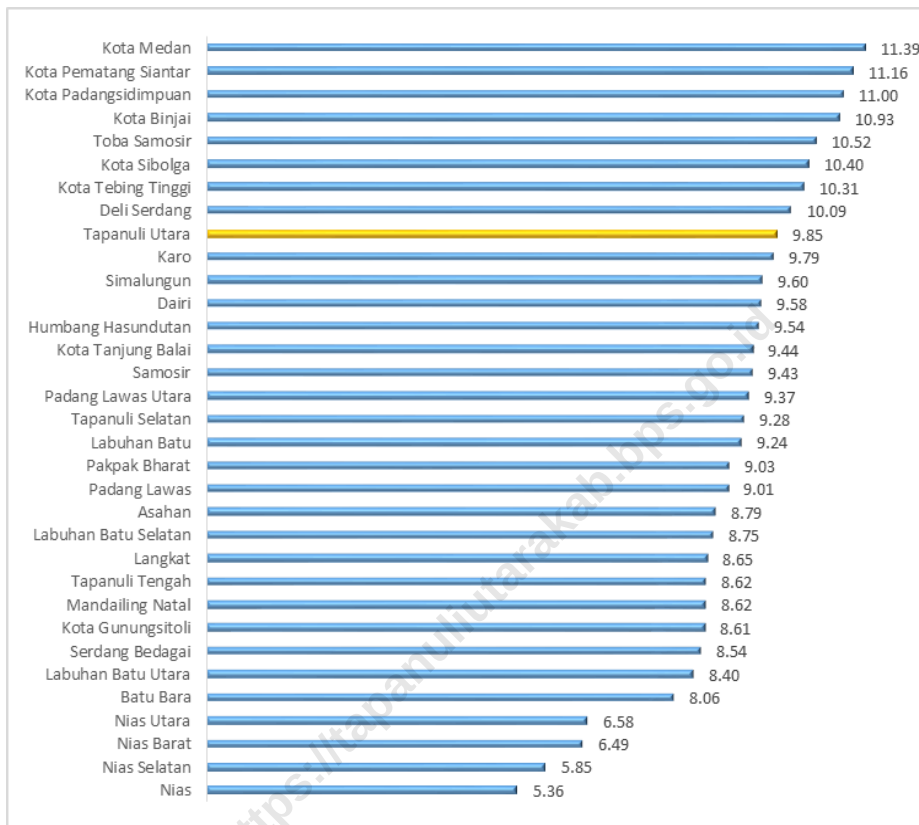
Gambar 3.3 Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, 2020



Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Utara

Dibandingkan kabupaten/kota lain di Provinsi Sumatera Utara, rata-rata lama sekolah Tapanuli Utara tahun 2020 menduduki peringkat kesembilan dari 33 kabupaten/kota yang ada di wilayah Sumatera Utara. RLS ini sangat perlu ditingkatkan dan harus menjadi perhatian pemerintah daerah. RLS tertinggi ada di Kota Medan mencapai 14,74 tahun, sedangkan RLS terendah di Kabupaten Nias yang hanya 12,23 tahun.

Gambar 3.4 Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, 2020

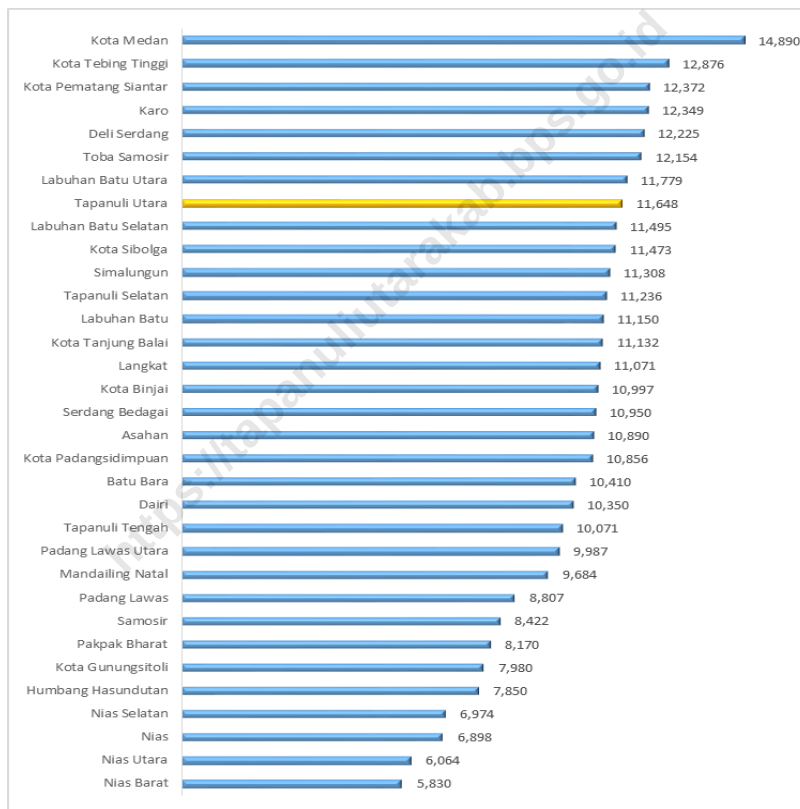


Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Utara

c. Pengeluaran per Kapita

Dimensi terakhir yaitu standar hidup layak, yang diukur melalui indikator rata-rata pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Rata-rata pengeluaran per kapita (PPP) Tapanuli Utara sebesar 11,648 juta rupiah per tahun.

Gambar 3.5 Pengeluaran per kapita (d disesuaikan) Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, 2020 (juta rupiah)



Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Utara

PPP Tapanuli Utara berada di atas rata-rata pengeluaran per kapita provinsi yang hanya sebesar 10,420 juta rupiah. Dibandingkan kabupaten/kota lain di Provinsi Sumatera Utara, pengeluaran per kapita di Tapanuli Utara tahun 2020 menduduki peringkat kedelapan teratas. Pengeluaran per kapita tertinggi di Kota Medan mencapai 14,890 juta rupiah per tahun, sedangkan terendah di Kabupaten

Nias Barat yang hanya 5,830 juta rupiah per kapita per tahun. Seluruh Kabupaten Kota di Sumatera Utara mengalami penurunan PPP, hal ini disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang menghambat aktivitas perekonomian di provinsi Sumatera Utara.

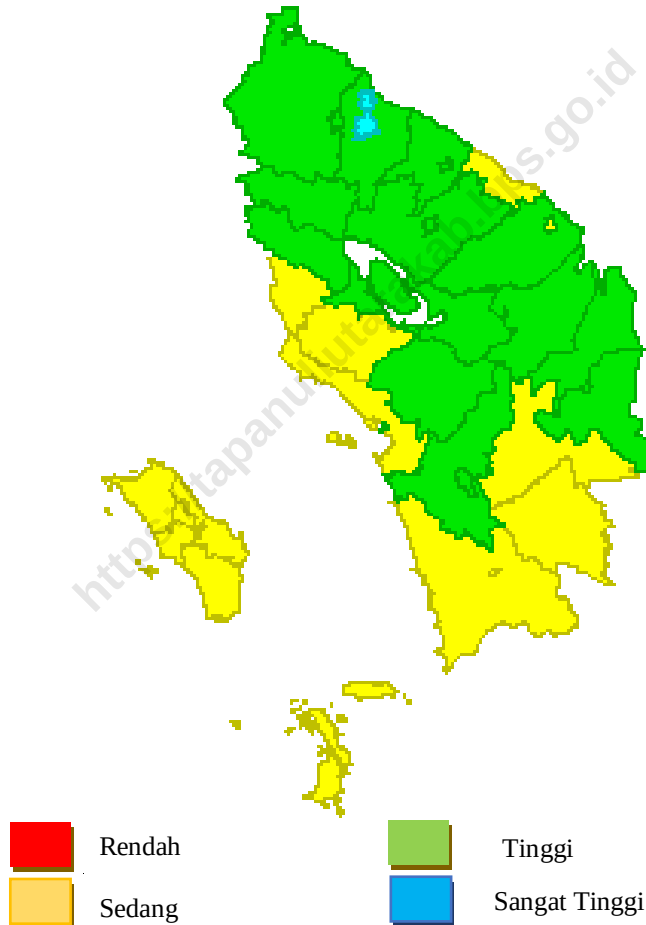
3.3 Status Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota

Di Sumatera Utara, IPM tertinggi yaitu Kota Medan, status pembangunan manusia ibukota provinsi tersebut masuk pada kategori “sangat tinggi”. Hanya satu kabupaten/kota yang berada pada status pembangunan manusia kategori sangat tinggi yaitu Kota Medan. Tapanuli Utara masuk dalam kategori “tinggi”. Terdapat 17 kabupaten/kota yang masuk dalam kategori “tinggi” dan 15 kabupaten/kota yang masuk dalam kategori “sedang”. Pada tahun 2020 sudah tidak ada kabupaten/kota di Sumatera Utara yang berada pada kategori pembangunan manusia “rendah”. Pembangunan manusia di wilayah Sumatera Utara tahun 2020 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya.

Kabupaten/kota yang termasuk dalam kategori status “tinggi” adalah Kota Pematang Siantar, Kota Binjai, Kabupaten Deli Serdang, Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Toba Samosir, Kota Padangsidimpuan, Kabupaten Karo, Kabupaten Tapanuli Utara, Kota Sibolga, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Dairi, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Samosir, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Asahan, dan Kabupaten Langkat. Sedangkan Kabupaten/Kota yang termasuk dalam kategori status “sedang” adalah Kabupaten Padang Lawas Utara, Kota Gunung Sitoli, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kota Tanjung Balai, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Batubara, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Selatan, dan Kabupaten Nias Barat.

Terdapat dua kabupaten yang mengalami perubahan status pembangunan manusia pada tahun 2020. Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai berubah dari status “sedang” ke “tinggi”.

Gambar 3.6 Indeks Pembangunan Manusia Sumatera Utara menurut Kabupaten Kota dan Status Pembangunan Manusia, 2020

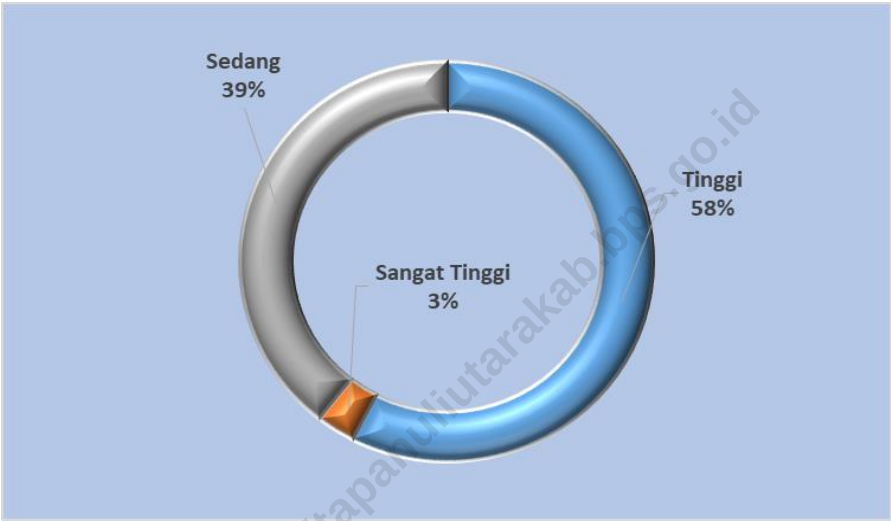


Sumber: IPM Sumatera Utara

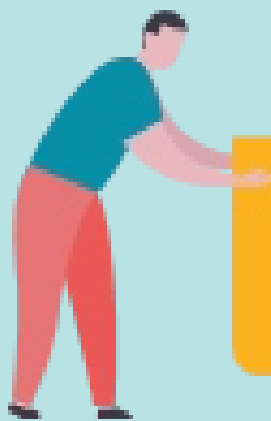
Sebanyak 39,39 persen status pembangunan manusia kabupaten/ kota di Sumatera Utara masih berstatus “sedang”. Lebih dari setengah (57,58 persen)

kabupaten/kota di Sumatera Utara telah berhasil mencapai status pembangunan manusia “tinggi”.

Gambar 3.7 Persentase Status Pembangunan Manusia menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, 2020



Sumber: BPS Kabupaten Tapanuli Utara



4

PERKEMBANGAN IPM



IPM

KABUPATEN
TAPANULI UTARA
TAHUN 2020

73,47

BAB IV

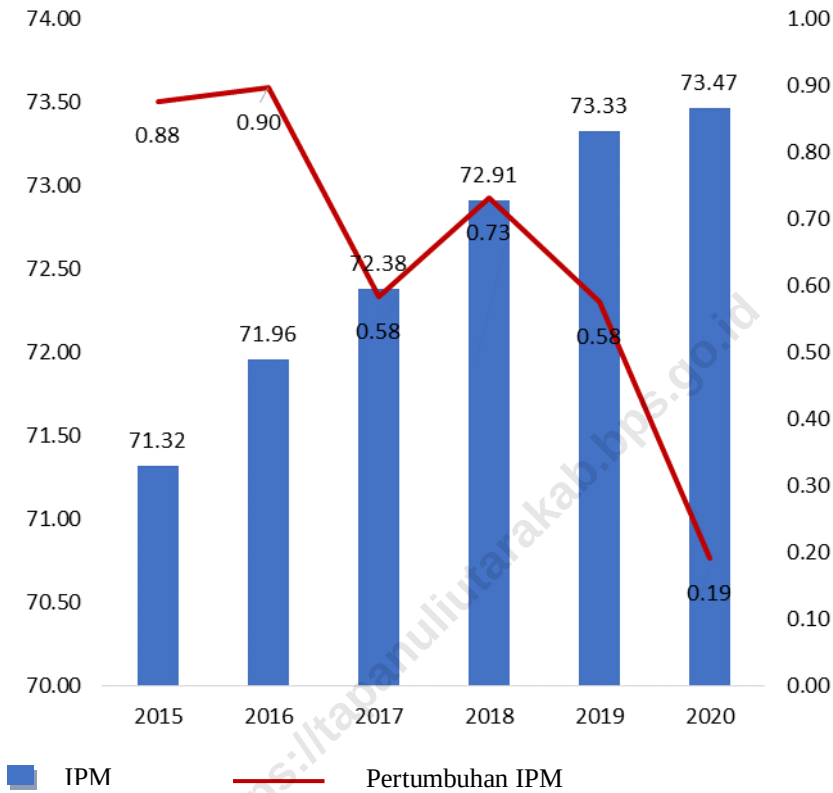
KEMAJUAN PEMBANGUNAN MANUSIA

4.1 Tren Terbaru dalam Pembangunan Manusia: Melalui Lensa IPM

Pembangunan manusia telah memberikan pemahaman baru terhadap sudut pandang pembangunan yang lebih luas. Perkembangan pembangunan manusia secara umum menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. IPM Tapanuli Utara tahun 2015 sebesar 71,32 terus meningkat menjadi 73,47 pada tahun 2020. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa IPM Tapanuli Utara terus tumbuh dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,60 persen per tahun dalam rentang tahun 2015-2019.

Peningkatan pembangunan manusia terus terjadi setiap tahun. Pertumbuhan IPM tertinggi pada tahun 2015-2020 terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 0,90 persen atau naik dari 71,32 pada tahun 2015 menjadi 71,96. Kemudian pertumbuhan ini melambat menjadi 0,58 persen pada tahun 2017 dan kembali meningkat menjadi 0,73 persen pada tahun 2018 sebesar 72,91. Namun kembali mengalami perlambatan 0,58 persen pada tahun 2019 sebesar 73,33 dan 0,14 persen pada tahun 2020.

Gambar 4.1 Perkembangan IPM Tapanuli Utara, 2015-2020



Sumber: BPS Kabupaten Tapanuli Utara

4.2 Status Pembangunan Manusia

Perkembangan pembangunan manusia terus meningkat dari waktu ke waktu. Tapanuli Utara menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan. Pada tahun 2019 IPM Tapanuli Utara tetap berada pada status “tinggi” yaitu dari 71,32 pada tahun 2015 menjadi 73,47 pada tahun 2020.

Tabel 4.1. Perubahan Status Pembangunan Manusia Tapanuli Utara, 2014-2018

Tahun	Nilai IPM	Status
(1)	(2)	(3)
2015	71,32	Tinggi
2016	71,96	Tinggi
2017	72,38	Tinggi
2018	72,91	Tinggi
2019	73,33	Tinggi
2020	73,47	Tinggi

Sumber: BPS Kabupaten Tapanuli Utara

Dalam kurun waktu 2015-2020, IPM Tapanuli Utara terus meningkat setiap tahunnya. Status pembangunan manusia Tapanuli Utara tahun 2015-2020 selalu berada pada status yang sama tiap tahunnya yaitu tinggi, meski pertumbuhan IPM berfluktuatif.

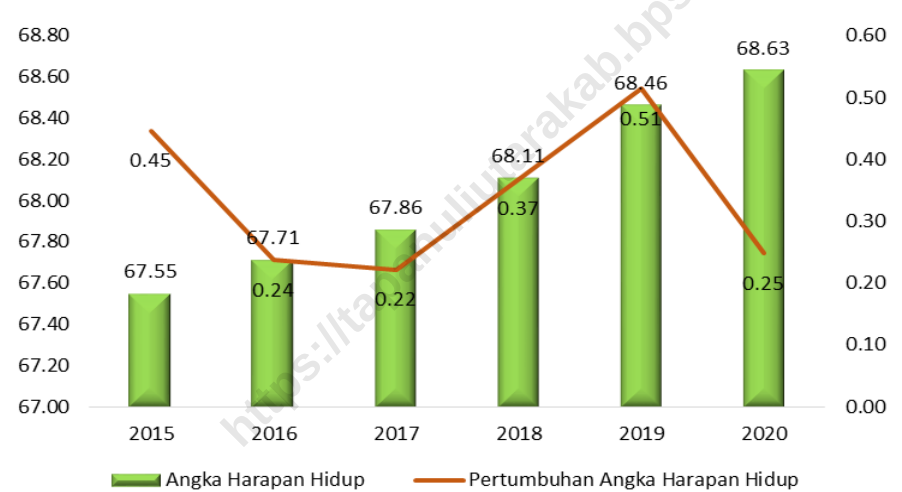
4.3 Hidup Lebih Lama, Kesehatan yang Lebih Baik

Hidup lebih lama merupakan dambaan setiap orang. Untuk dapat berumur panjang, salah satu faktornya diperlukan kesehatan yang lebih baik. Proksi umur panjang dan sehat yang digunakan dalam pembangunan manusia adalah indikator angka harapan hidup saat lahir (e_0). Indikator AHH menjadi salah satu indikator gambaran kesehatan masyarakat yang sering digunakan untuk mengevaluasi kinerja

pembangunan di bidang kesehatan. Angka Harapan Hidup (AHH) adalah rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup.

AHH dapat menggambarkan tingkat kesehatan yang telah dicapai oleh masyarakat. Semakin tinggi tingkat kesehatan masyarakat, diharapkan kesempatan untuk bertahan hidup akan semakin besar. Sebaliknya, tingkat kesehatan yang buruk akan cenderung memperpendek usia hidup. Angka harapan hidup berbanding terbalik dengan tingkat kematian bayi, artinya semakin rendah angka kematian bayi maka angka harapan hidup akan semakin tinggi, demikian pula sebaliknya.

Gambar 4.2 Perkembangan Angka Harapan Hidup Tapanuli Utara, 2015-2020



Sumber: BPS Kabupaten Tapanuli Utara

Gambar 4.2 memperlihatkan perkembangan AHH Tapanuli Utara selama kurun waktu lima tahun terakhir. Pada gambar tersebut terlihat bahwa AHH Tapanuli Utara selama periode 2015-2020 menunjukkan adanya peningkatan yang konsisten. Artinya, harapan seorang bayi yang baru lahir untuk dapat hidup lebih lama menjadi semakin tinggi. AHH Tapanuli Utara pada tahun 2020 mencapai 68,63 tahun. Berarti setiap bayi di Tapanuli Utara yang dilahirkan pada tahun 2020, dapat berharap untuk hidup sampai usia 68,63 tahun.

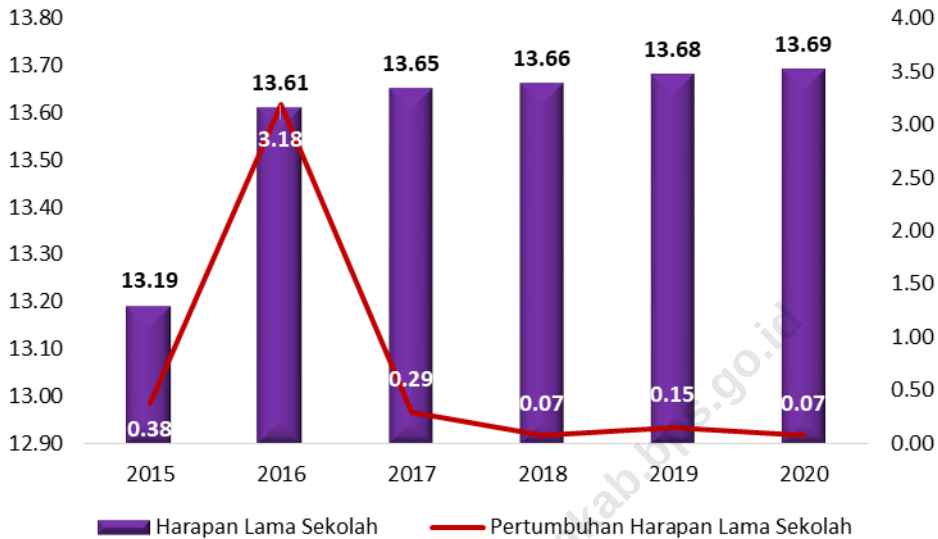
Selama tahun 2015-2020, angka harapan hidup saat lahir di Tapanuli Utara tumbuh rata-rata 0,34 persen per tahun. Pertumbuhan AHH tertinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 0,51 persen. Sedangkan pertumbuhan AHH terlambat terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 0,22 persen. Peningkatan AHH pada tahun 2020 melambat dibandingkan tahun 2019, hal ini diindikasikan karena terjadinya pandemi *Coronavirus Disease 2019* yang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia sepanjang tahun 2020.

4.4 Pendidikan Memperluas Peluang

Pendidikan memperluas peluang seseorang, juga meningkatkan kreativitas dan imajinasi. Sebagai nilai tambah, pendidikan juga akan memperluas pilihan-pilihan lain. Manusia yang berpendidikan kecenderungan akan lebih memperhatikan tingkat kesehatan agar dapat hidup lebih lama. Tidak hanya itu, manusia yang berpendidikan secara umum juga akan berpeluang besar mendapatkan pekerjaan dan pendapatan yang lebih layak. Pendidikan juga mempunyai korelasi yang kuat dengan berbagai aspek sosial ekonomi. Oleh karena itu, pendidikan menjadi penting sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas manusia agar dapat memperluas peluang mereka.

Berbagai penelitian menyimpulkan bahwa tingkat pendidikan mempunyai hubungan yang kuat dengan kualitas hidup dan kesejahteraan keluarga maupun masyarakat. Pada dasarnya pembangunan pendidikan difokuskan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan dan memperluas kesempatan memperoleh pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat, baik muda maupun tua di setiap jenjang pendidikan utamanya hingga SLTA, serta untuk meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan dengan perkembangan dunia usaha. Peningkatan partisipasi masyarakat ini, bisa dilihat dari peningkatan Harapan Lama Sekolah (HLS) serta Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk, yang keberhasilannya memerlukan dukungan keluarga, masyarakat luas dan pemerintah.

Gambar 4.3. Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) Tapanuli Utara, 2015-2020

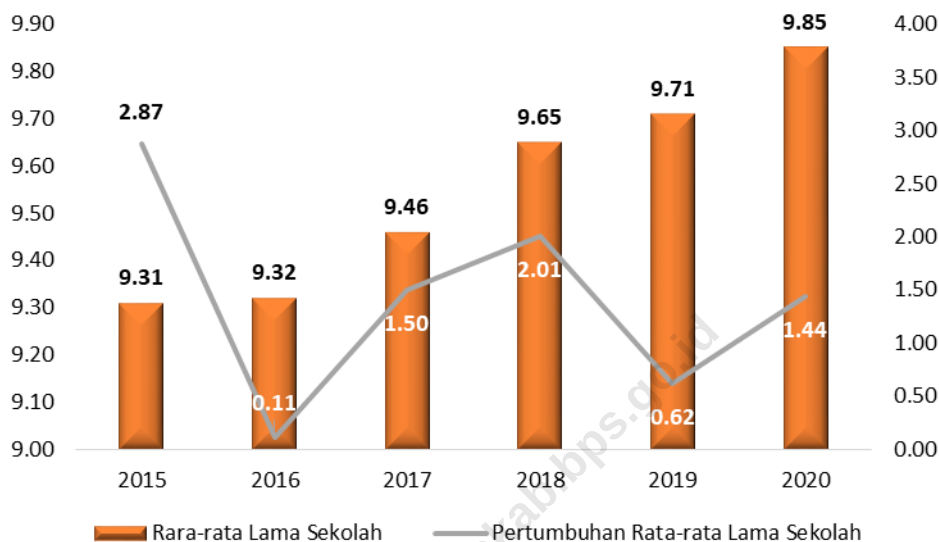


Sumber: BPS Kabupaten Tapanuli Utara

Pada tahun 2015, harapan lama sekolah di Tapanuli Utara sebesar 13,19 tahun secara konsisten terus meningkat menjadi 13,69 pada 2020. Hal ini berarti anak usia 7 tahun yang masuk dunia pendidikan diharapkan akan dapat bersekolah selama 13,69 tahun atau mencapai Diploma II. Rata-rata pertumbuhan harapan lama sekolah sebesar 0,69 persen per tahun. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2016 yang mencapai 3,18 persen, sedangkan pertumbuhan terlambat terjadi pada tahun 2018 dan 2020 yaitu hanya sebesar 0,07 persen.

Rata-rata lama sekolah juga meningkat secara konsisten dari tahun 2015 sebesar 9,31 tahun hingga mencapai 9,85 tahun pada tahun 2020. Artinya penduduk usia 25 tahun ke atas rata-rata bersekolah sampai kelas I SMA. Rata-rata lama sekolah selama lima tahun terakhir tumbuh sebesar 1,43 persen per tahun. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 2,87 persen dan pertumbuhan terlambat terjadi pada tahun 2014 dan 2016 yaitu sebesar 0,11 persen.

Gambar 4.4. Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Tapanuli Utara, 2015-2020



Sumber: BPS Kabupaten Tapanuli Utara

Peningkatan komponen pendidikan meski tidak signifikan yaitu harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah pada tahun 2020 sejalan dengan perkembangan jumlah fasilitas pendidikan yang masih tetap. Hanya terdapat penambahan jumlah murid pada jenjang pendidikan SMP tahun ajaran 2020/2021.

Tabel 4.2. Jumlah Sekolah dan Murid Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Tapanuli Utara, 2019-2020

Jenjang Pendidikan	Sekolah		Murid	
	2019/2020	2020/2021	2019/2020	2020/2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SD	386	386	42.156	41.267
SMP	79	79	22.394	22.410

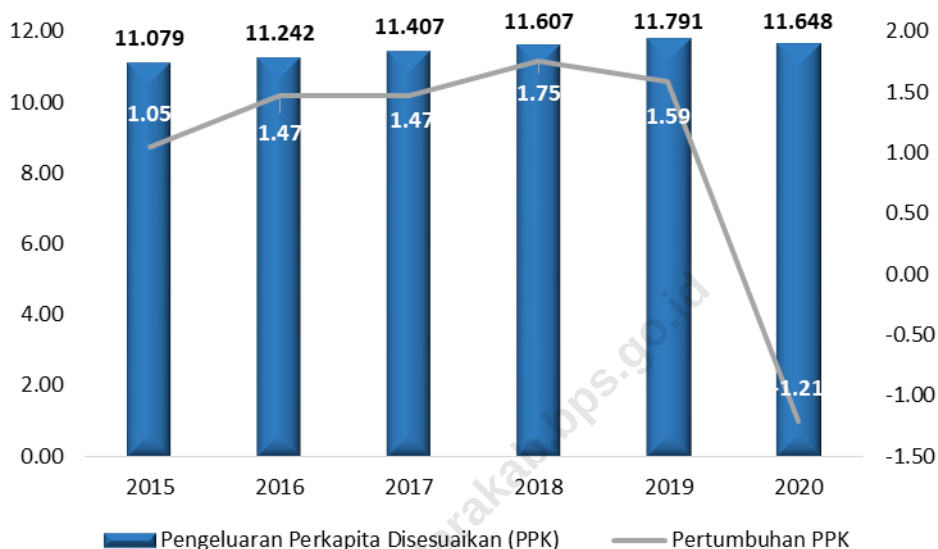
Sumber: Dapodik Kemendikbud

4.5 Kenaikan Standar Hidup

Pengeluaran atau pendapatan telah memberikan sedikit gambaran mengenai ukuran pembangunan, seperti yang telah terjadi pada era tahun 70-an. Akan tetapi uang memiliki arti yang penting untuk memperluas pilihan, terutama bagi penduduk miskin. Oleh karena itu, perkembangan tingkat pengeluaran menjadi hal menarik untuk diteliti.

Daya beli masyarakat mencerminkan kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang maupun jasa. Indeks daya beli digunakan untuk mengukur standar hidup layak. Sehingga, dengan pendapatan yang ada manusia dapat menciptakan daya beli untuk memenuhi berbagai kebutuhannya. Dalam penghitungan indeks daya beli digunakan pendekatan pengeluaran perkapita yang telah disesuaikan dengan tingkat inflasi di daerah masing-masing. Penyesuaian ini diperlukan untuk menstandarkan tingkat harga yang berlaku di masing-masing daerah. Tingkat pengeluaran perkapita yang sama di suatu daerah belum tentu menunjukkan daya beli terhadap barang dan jasa yang sama karena tingkat harga di setiap daerah itu berbeda dan selera/pola konsumsi masyarakat berbeda, oleh sebab itu pengeluaran perkapita ini terlebih dahulu disesuaikan untuk dapat mengukur tingkat daya beli yang nyata. Kemampuan ini berbeda antar wilayah, karena nilai tukar antar wilayah juga berbeda bergantung kepada harga riil pada masing-masing wilayah. Agar kemampuan daya beli masyarakat antar wilayah menjadi terbanding, perlu dibuat standarisasi. Misalnya, satu rupiah di suatu wilayah memiliki daya beli yang sama dengan satu rupiah di Jakarta Selatan. Dengan adanya standarisasi ini, maka perbedaan kemampuan daya beli masyarakat antar wilayah dapat dibandingkan.

Gambar 4.6. Perkembangan Pengeluaran per Kapita per Tahun Tapanuli Utara, 2015-2020 (juta rupiah)

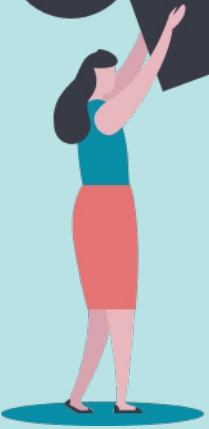


Sumber: BPS Kabupaten Tapanuli Utara

Pada Tahun 2015, pengeluaran perkapita penduduk Tapanuli Utara sebesar 11,08 juta rupiah perkapita pertahun, meningkat menjadi 11,79 juta rupiah perkapita pertahun pada tahun 2019. Namun pada tahun 2020 pengeluaran perkapita penduduk Tapanuli Utara mengalami penurunan menjadi 11,65 juta rupiah. Pengeluaran perkapita yang menunjukkan kemampuan daya beli masyarakat Tapanuli Utara selama periode 2015-2019 terus meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 1,47 persen per tahun. Namun menurun pada tahun 2019, hal ini diindikasikan karena pandemi COVID-19 yang menghambat kinerja perekonomian di Kabupaten Tapanuli Utara. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2018 yaitu 1,75 persen, sedangkan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2020 yaitu minus 1,21 persen.

5

PERBANDINGAN PEMBANGUNAN MANUSIA DI KAWASAN DANAU TOBA



BAB V

PERBANDINGAN PEMBANGUNAN MANUSIA DI KAWASAN DANAU TOBA

5.1 Gambaran Umum Tapanuli Utara

Kabupaten Tapanuli Utara merupakan salah satu dari 33 Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, berada pada punggung Pegunungan Bukit Barisan (Dataran Tinggi) dengan luas wilayah Kabupaten Tapanuli Utara seluas 3.800,31 Km². Luas daratannya 3.793,71 Km² dengan luas perairan Danau Toba 6,60 Km². Ditinjau dari posisinya, Kabupaten Tapanuli Utara terletak pada posisi yang strategis karena berada pada posisi silang dan jalur lintas dari dan ke beberapa daerah kabupaten lainnya di Sumatera Utara. Batas-batas wilayah Kabupaten Tapanuli Utara adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kabupaten Toba Samosir
Sebelah Timur : Kabupaten Labuhan Batu Utara
Sebelah Selatan : Kabupaten Tapanuli Selatan
Sebelah Barat : Kabupaten Humbang Hasundutan
dan Tapanuli Tengah

Kabupaten Tapanuli Utara terdiri dari 15 Kecamatan, terdapat 241 desa dan 11 kelurahan.

Tabel 5.1. Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Tapanuli Utara

Kecamatan		Luas (km ²)	Rasio Terhadap Total (%)
(1)		(2)	(3)
1.	Parmonangan	257,35	6,78
2.	Adiankoting	502,90	13,26
3.	Sipoholon	189,20	4,99
4.	Tarutung	107,68	2,84
5.	Siatas Barita	92,92	2,45
6.	Pahae Julu	165,90	4,37
7.	Pahae Jae	203,20	5,36
8.	Purbatua	191,80	5,06
9.	Simangumban	150,00	3,95
10.	Pangaribuan	459,25	12,10
11.	Garoga	567,58	14,96
12.	Sipahutar	408,22	10,76
13.	Siborongborong	279,91	7,38
14.	Pagaran	138,05	3,64
15.	Muara	79,75	2,10
Tapanuli Utara		3 793,71	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Utara

Berdasarkan luas daerah menurut kecamatan di Tapanuli Utara, luas daerah terbesar adalah Kecamatan Garoga dengan luas 567,58 km² atau 14,96 persen dari total luas Tapanuli Utara. Sedangkan luas daerah terkecil adalah Kecamatan Muara dengan luas 79,75 km² atau sekitar 2,10 persen dari total luas wilayah Tapanuli Utara.

5.2 Perbandingan Pencapaian Pembangunan Manusia Antar Kabupaten/Kota di Kawasan Danau Toba

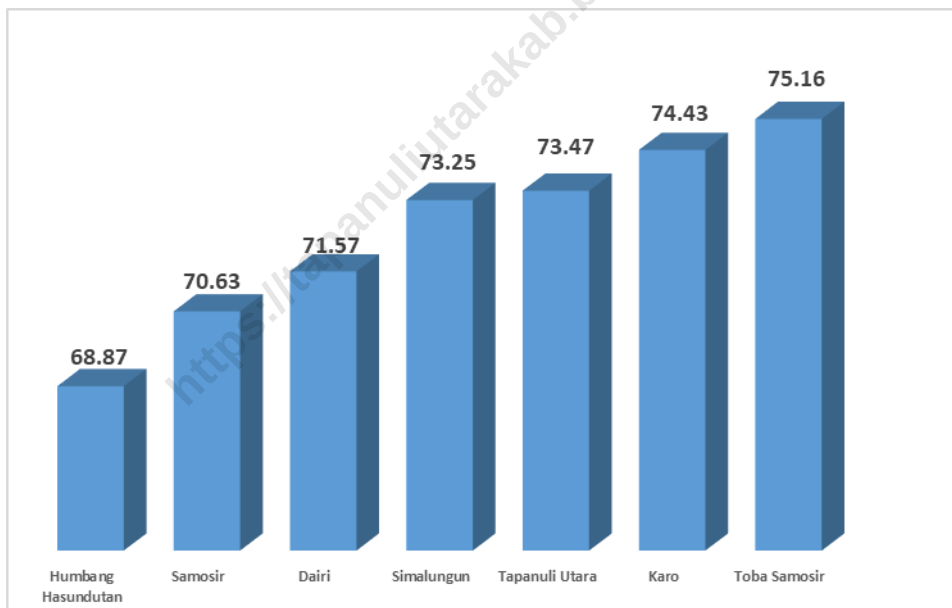
Pencapaian pembangunan antar wilayah dalam jangka panjang bisa memberikan dampak pada kehidupan sosial masyarakat yang secara langsung juga mempengaruhi kualitas manusianya. Oleh sebab itu, perbandingan pencapaian pembangunan manusia antar wilayah menjadi sangat penting sebagai dasar evaluasi

pemerintah dalam perumusan kebijakan yang selanjutnya digunakan dalam rangka peningkatan sumber daya manusia.

Terdapat 7 (tujuh) kabupaten yang bersentuhan langsung dengan kawasan Danau Toba, yaitu Tapanuli Utara, Toba Samosir, Simalungun, Samosir, Humbang Hasundutan, Dairi, dan Karo.

Berkaitan dengan pembangunan manusia, perbedaan pembangunan manusia juga terjadi antara kabupaten/kota di Kawasan Danau Toba. Secara umum pembangunan manusia di wilayah kabupaten lebih tertinggal dibandingkan wilayah kota.

Gambar 5.1 IPM Kabupaten/Kota di Kawasan Danau Toba, 2020



Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Utara

Tahun 2020, IPM kabupaten/kota tertinggi di Kawasan Danau Toba adalah Kabupaten Toba Samosir yaitu sebesar 75,16 dan yang paling rendah adalah Kabupaten Humbang Hasundutan yang hanya sebesar 68,87. Pencapaian IPM Kabupaten Toba Samosir yang tinggi sangat wajar karena daerah tersebut merupakan kabupaten yang termasuk sebagai salah satu daerah pusat pendidikan. Rata-rata IPM

pada Kawasan Danau Toba adalah 72,48. Kabupaten Tapanuli Utara berada pada urutan ke-3 dengan nilai IPM yang berada di atas rata-rata kawasan.

Capaian pembangunan manusia di Kawasan Danau Toba berada pada status tinggi dan sedang. Tahun 2020, sebanyak 85,71 persen kabupaten/kota di Kawasan Danau Toba telah berada pada status pembangunan manusia “tinggi” dan 14,29 persen kabupaten/kota lainnya berada pada status pembangunan manusia “sedang”.

Tabel 5.2 Status IPM Kabupaten/Kota di Kawasan Danau Toba, 2020

Kabupaten/Kota	IPM	Status
(1)	(2)	(3)
Humbang Hasundutan	68,87	Sedang
Samosir	70,63	Sedang
Dairi	71,57	Tinggi
Simalungun	73,25	Tinggi
Tapanuli Utara	73,47	Tinggi
Karo	74,43	Tinggi
Toba Samosir	75,16	Tinggi

Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Utara

Pencapaian pembangunan manusia di Kawasan Danau Toba cukup bagus karena tidak ada kabupaten/kota dengan status pembangunan manusia yang masih “rendah”. Kabupaten Tapanuli Utara berada pada status pembangunan manusia “tinggi” sama seperti Kabupaten Toba Samosir, Karo, Simalungun, Samosir dan Dairi. Terdapat satu kabupaten yang berada pada pembangunan manusia berstatus “sedang” yaitu Kabupaten Humbang Hasundutan.

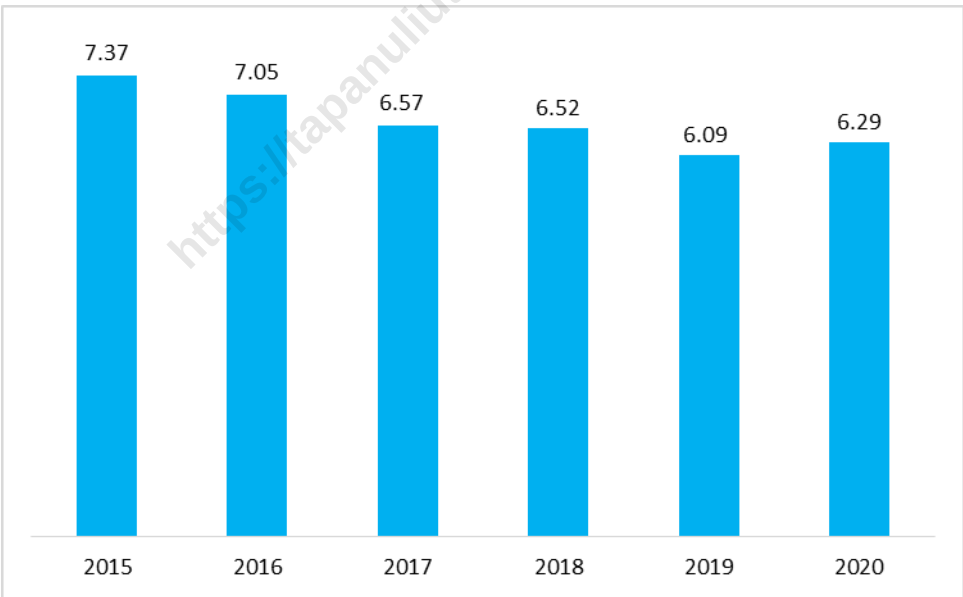
Disparitas yang cukup tinggi tidak bisa dibiarkan berlanjut ke generasi yang akan datang. Upaya percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi di Kawasan Danau Toba adalah hal yang perlu dilakukan sebagai titik awal menuju Sumatera

Utara yang lebih merata karena upaya pemerataan pembangunan tidak akan terwujud dalam jangka waktu singkat.

5.3 Perbandingan Pembangunan Manusia di Kawasan Danau Toba

Selama kurun waktu enam tahun, pembangunan manusia di Kawasan Danau Toba Sumatera Utara cenderung mengalami penurunan. Selama tahun 2015-2019, terjadi penurunan namun pada tahun 2020 terjadi peningkatan selisih. Perbandingan antara angka IPM tertinggi dan terendah. Tahun 2015, selisih IPM kabupaten/kota di Kawasan Danau Toba tertinggi (Toba Samosir) dengan terendah (Humbang Hasundutan) sebesar 7,37 turun menjadi 6,29 pada tahun 2020. Rentang IPM cenderung menyempit.

Gambar 5.2 Perkembangan Selisih IPM Kabupaten/Kota Tertinggi dengan Terendah di Kawasan Danau Toba, 2015-2020



Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Utara

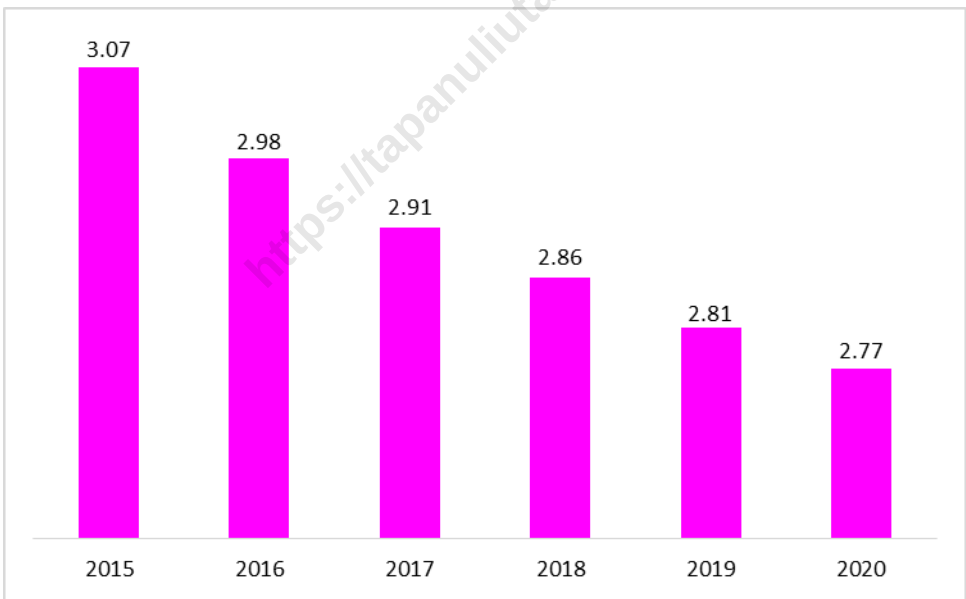
Penurunan Perbandingan IPM belum konsisten, sehingga upaya pemerataan pembangunan masih perlu ditingkatkan. Pemerintah tentunya harus mempertimbangkan daerah yang menjadi prioritas agar Perbandingan juga semakin mengecil. Bagai sebuah paradoks, peningkatan yang signifikan di suatu wilayah, akan

memperbesar jurang perbedaan jika tidak diimbangi oleh pembangunan wilayah lainnya.

a. Perbandingan Kesehatan

Seiring dengan kesehatan masyarakat di Kawasan Danau Toba Sumatera Utara yang semakin membaik, Perbandingan kesehatan antar kabupaten/kota pun semakin mengecil. Hal ini dapat dilihat dari jarak antara AHH tertinggi dengan AHH terendah. Tahun 2015, selisih AHH kabupaten/kota tertinggi dengan terendah sebesar 3,07 turun menjadi 2,81 pada tahun 2019. Rentang Perbandingan AHH cenderung menyempit.

Gambar 5.3 Perkembangan Selisih AHH Kabupaten/Kota Tertinggi dengan Terendah di Kawasan Danau Toba, 2015-2020



Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Utara

Kabupaten/kota dengan AHH terendah yaitu Kabupaten Tapanuli Utara, sedangkan AHH tertinggi dicapai oleh Kabupaten Karo. Penurunan Perbandingan AHH antar kabupaten/kota di Kawasan Danau Toba Sumatera Utara cukup baik, namun

perbandingan sebesar 2,77 pada tahun 2020 masih membutuhkan perhatian lebih. Dalam hal ini, upaya-upaya untuk pemerataan pembangunan kesehatan masyarakat harus terus digalakkan agar Perbandingan kesehatan semakin sangat kecil.

b. Perbandingan Pendidikan

Seiring dengan perbaikan kualitas kesehatan, dalam kurun waktu 2015-2020, pendidikan di Sumatera Utara juga menunjukkan perkembangan yang baik. Di semua kabupaten/kota pada Kawasan Danau Toba, Harapan lama sekolah penduduk 7 tahun semakin meningkat. Begitu pula dengan rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas yang semakin meningkat dari tahun ke tahun.

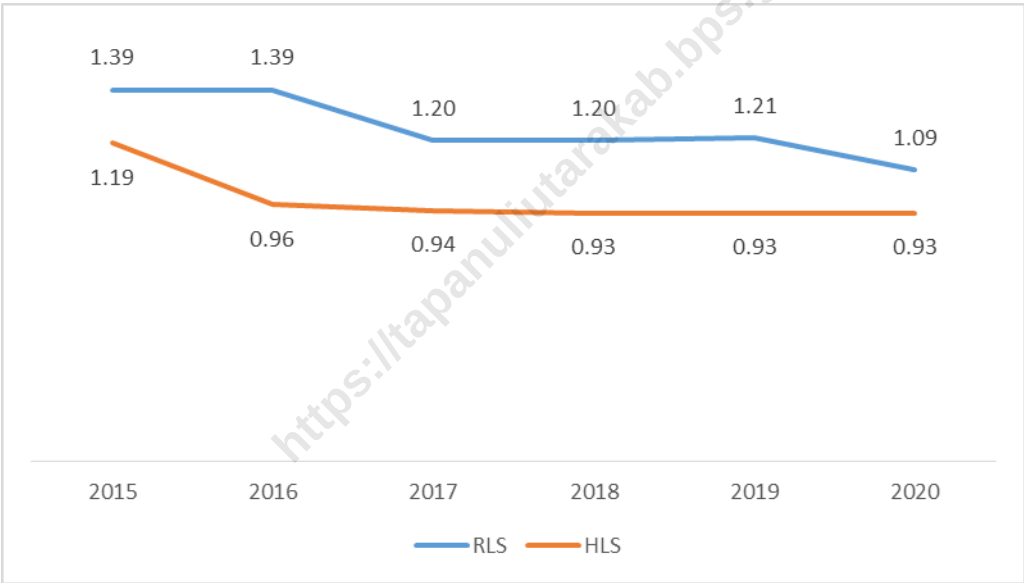
Perbandingan capaian pembangunan pendidikan yang ditunjukkan dengan rentang angka Harapan Lama Sekolah (HLS) tertinggi dan terendah kabupaten/kota di Kawasan Danau Toba cenderung menurun. Tahun 2015, selisih HLS kabupaten/kota tertinggi dengan terendah sebesar 0,97 turun menjadi 0,93 pada tahun 2020.

HLS tertinggi pada tahun 2015 adalah Kabupaten Samosir, sedangkan HLS terendah Kabupaten Karo. Tahun 2016-2020 HLS tertinggi berubah menjadi berada pada Kabupaten Tapanuli Utara, sedangkan HLS terendah tetap pada Kabupaten Karo. Pada tahun 2020, rata-rata penduduk usia 7 tahun di Kabupaten Tapanuli Utara berpotensi menempuh pendidikan selama 13,69 tahun. Sementara di Kabupaten Karo berpotensi menempuh pendidikan selama 12,76 tahun. Upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat untuk sekolah semakin merata, namun tetap perlu ditingkatkan.

Pola yang sedikit berbeda terjadi pada indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Selama enam tahun terakhir, Perbandingan RLS tertinggi dengan terendah yang terjadi di Kawasan Danau Toba tidak stabil bahkan cenderung menurun. Tahun 2015 selisih RLS kabupaten/kota tertinggi dengan terendah sebesar 1,39 turun menjadi 1,09 pada tahun 2020. Penurunan selisih RLS terendah terjadi pada tahun 2020.

Perbandingan rata-rata lama sekolah di Kawasan Danau Toba tahun 2020 terjadi akibat perbedaan capaian antara Kabupaten Toba Samosir dengan Kabupaten Samosir. Di tahun 2020, rata-rata penduduk Kabupaten Toba Samosir yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 10,52 tahun. sementara di Kabupaten Samosir hanya menempuh pendidikan selama 9,43 tahun. Oleh karena itu, pemerataan sarana dan akses pendidikan harus digalakkan agar Perbandingan semakin kecil.

Gambar 5.4 Perkembangan Selisih HLS dan RLS Kabupaten/Kota Tertinggi dengan Terendah di Kawasan Danau Toba, 2015-2020



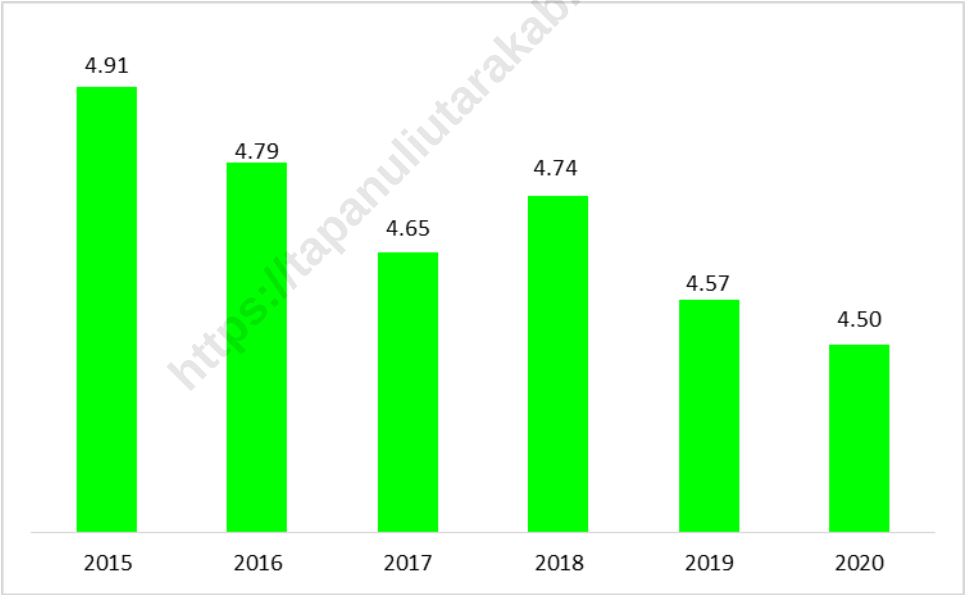
Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Utara

c. Perbandingan Pengeluaran per Kapita

Dimensi standar hidup yang layak menjadi salah satu kunci penting dalam membangun kualitas kehidupan manusia. Dimensi ini diproksi dengan indikator pengeluaran per kapita (d disesuaikan). Selama kurun waktu 2015 hingga 2020, angka pengeluaran per kapita Kawasan Danau Toba terus meningkat. Namun, hal itu masih menyisakan persoalan Perbandingan antarwilayah.

Perbandingan selisih pengeluaran per kapita tinggi di tahun 2015 hingga 2020 semakin mengecil walau sempat melebar tahun 2018. Tahun 2015 selisih pengeluaran per kapita kabupaten/kota tertinggi yaitu Kabupaten Karo dengan terendah yaitu Kabupaten Humbang Hasundutan dengan selisih sebesar 4,91 juta. Selisih pengeluaran perkapita turun menjadi 4,65 juta di tahun 2016. Namun, peningkatan selisih perbandingan pengeluaran perkapita terjadi pada tahun 2018 menjadi 4,74 juta. Kemudian selisihnya menurun kembali menjadi 4,50 juta di tahun 2020.

Gambar 5.5 Perkembangan Selisih Pengeluaran Perkapita Kabupaten/Kota Tertinggi dengan Terendah di Kawasan Danau Toba (juta rupiah), 2015-2020



Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Utara

LAMPIRAN



Lampiran 1.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, 2020

Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup (tahun)	Harapan Lama Sekolah (tahun)	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (ribu rupiah)	IPM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nias	69.75	12.57	5.36	6,898	61.93
Mandailing Natal	62.60	13.32	8.62	9,684	66.79
Tapanuli Selatan	64.91	13.24	9.28	11,236	70.12
Tapanuli Tengah	67.15	13.06	8.62	10,071	69.23
Tapanuli Utara	68.63	13.69	9.85	11,648	73.47
Toba Samosir	70.08	13.45	10.52	12,154	75.16
Labuhan Batu	69.93	12.73	9.24	11,150	72.01
Asahan	68.26	12.60	8.79	10,890	70.29
Simalungun	71.22	12.78	9.60	11,308	73.25
Dairi	69.00	13.10	9.58	10,350	71.57
Karo	71.40	12.76	9.79	12,349	74.43
Deli Serdang	71.73	13.35	10.09	12,225	75.44
Langkat	68.80	13.05	8.65	11,071	71.00
Nias Selatan	68.74	12.23	5.85	6,974	61.89
Humbahas	69.27	13.28	9.54	7,850	68.87
Pakpak Barat	65.74	13.86	9.03	8,170	67.59
Samosir	71.27	13.47	9.43	8,422	70.63
Serdang Bedagai	68.68	12.60	8.54	10,950	70.24
Batu Bara	66.96	12.63	8.06	10,410	68.36
Paluta	67.17	12.87	9.37	9,987	69.85
Padang Lawas	67.09	13.03	9.01	8,807	68.25
Labuhanbatu Selatan	68.71	13.00	8.75	11,495	71.40
Labuhanbatu Utara	69.46	13.04	8.40	11,779	71.61
Nias Utara	69.43	13.03	6.58	6,064	62.36
Nias Barat	68.96	12.94	6.49	5,830	61.51
Kota Sibolga	69.01	13.16	10.40	11,473	73.63
Kota Tanjung Balai	63.27	12.50	9.44	11,132	68.65
Kota P. Siantar	73.55	14.45	11.16	12,372	78.75
Kota Tebing Tinggi	70.87	12.72	10.31	12,876	75.17
Kota Medan	73.14	14.74	11.39	14,890	80.98
Kota Binjai	72.38	13.62	10.93	10,997	75.89
Kota P. Sidempuan	69.41	14.54	11.00	10,856	75.22
Kota Gunung Sitoli	71.19	13.74	8.61	7,980	69.31
SUMATERA UTARA	69,10	13,23	9,54	10.420	71,77

Lampiran 2.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, 2019

Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup (tahun)	Harapan Lama Sekolah (tahun)	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (ribu rupiah)	IPM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nias	69,68	12,39	5,15	7.042	61,65
Mandailing Natal	62,51	13,17	8,36	9.900	66,52
Tapanuli Selatan	64,82	13,12	8,97	11.410	69,75
Tapanuli Tengah	67,08	12,79	8,48	10.175	68,86
Tapanuli Utara	68,46	13,68	9,71	11.791	73,33
Toba Samosir	69,93	13,28	10,36	12.375	74,92
Labuhan Batu	69,86	12,67	9,23	11.193	71,94
Asahan	68,11	12,59	8,49	10.983	69,92
Simalungun	71,07	12,77	9,36	11.422	72,98
Dairi	68,79	13,09	9,34	10.602	71,42
Karo	71,27	12,75	9,62	12.474	74,25
Deli Serdang	71,61	13,34	10,08	12.317	75,43
Langkat	68,59	12,81	8,64	11.208	70,76
Nias Selatan	68,58	12,22	5,53	7.105	61,59
Humbahas	69,06	13,27	9,53	7.902	68,83
Pakpak Barat	65,59	13,85	8,73	8.402	67,47
Samosir	71,16	13,46	9,15	8.654	70,55
Serdang Bedagai	68,46	12,59	8,53	11.061	70,21
Batu Bara	66,75	12,62	8,02	10.575	68,35
Paluta	67,06	12,47	9,10	10.194	69,29
Padang Lawas	66,98	13,02	8,69	9.100	68,16
Labuhanbatu Selatan	68,64	12,99	8,74	11.553	71,39
Labuhanbatu Utara	69,37	12,82	8,36	11.957	71,43
Nias Utara	69,29	12,78	6,25	6.245	61,98
Nias Barat	68,82	12,71	6,14	6.009	61,14
Kota Sibolga	68,77	13,15	10,18	11.656	73,41
Kota Tanjung Balai	63,02	12,49	9,26	11.383	68,51
Kota P. Siantar	73,33	14,21	11,15	12.571	78,57
Kota Tebing Tinggi	70,76	12,71	10,28	12.895	75,08
Kota Medan	72,98	14,73	11,38	15.033	80,97
Kota Binjai	72,25	13,61	10,77	11.260	75,89
Kota P. Sidempuan	69,15	14,53	10,70	11.181	75,06
Kota Gunung Sitoli	71,02	13,73	8,58	8.058	69,30
SUMATERA UTARA	68,95	13,15	9,45	10.649	71,74

Lampiran 3.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, 2018

Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup (tahun)	Harapan Lama Sekolah (tahun)	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (ribu rupiah)	IPM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nias	69,43	12,13	4,94	6.941	60,82
Mandailing Natal	62,24	13,15	8,11	9.653	65,83
Tapanuli Selatan	64,55	13,10	8,70	11.209	69,10
Tapanuli Tengah	66,82	12,66	8,29	10.067	68,27
Tapanuli Utara	68,11	13,66	9,65	11.607	72,91
Toba Samosir	69,59	13,26	10,34	12.095	74,48
Labuhan Batu	69,60	12,60	9,04	11.053	71,39
Asahan	67,79	12,56	8,47	10.735	69,49
Simalungun	70,75	12,75	9,18	11.311	72,49
Dairi	68,41	13,07	9,15	10.492	70,89
Karo	70,97	12,73	9,55	12.367	73,91
Deli Serdang	71,31	13,32	9,92	12.132	74,92
Langkat	68,22	12,75	8,52	11.088	70,27
Nias Selatan	68,24	12,20	5,20	6.941	60,75
Humbahas	68,69	13,25	9,28	7.630	67,96
Pakpak Barat	65,27	13,83	8,48	8.099	66,63
Samosir	70,87	13,44	9,14	8.348	69,99
Serdang Bedagai	68,08	12,57	8,51	10.737	69,69
Batu Bara	66,38	12,52	7,84	10.385	67,67
Paluta	66,77	12,42	9,06	9.912	68,77
Padang Lawas	66,69	13,00	8,67	8.772	67,59
Labuhanbatu Selatan	68,39	12,97	8,71	11.280	70,98
Labuhanbatu Utara	69,09	12,80	8,35	11.730	71,08
Nias Utara	68,98	12,58	6,09	6.041	61,08
Nias Barat	68,50	12,66	6,00	5.817	60,42
Kota Sibolga	68,36	13,13	9,91	11.405	72,65
Kota Tanjung Balai	62,60	12,47	9,24	11.102	68,00
Kota P. Siantar	72,93	14,02	11,08	12.290	77,88
Kota Tebing Tinggi	70,47	12,68	10,24	12.434	74,50
Kota Medan	72,64	14,72	11,37	14.845	80,65
Kota Binjai	71,95	13,59	10,75	10.750	75,21
Kota P. Sidempuan	68,73	14,51	10,63	10.795	74,38
Kota Gunung Sitoli	70,67	13,71	8,41	7.639	68,33
SUMATERA UTARA	68,61	13,14	9,34	10.391	71,18

Lampiran 4.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, 2017

Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup (tahun)	Harapan Lama Sekolah (tahun)	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (ribu rupiah)	IPM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nias	69,18	12,12	4,93	6.629	60,21
Mandailing Natal	61,97	12,99	8,00	9.385	65,13
Tapanuli Selatan	64,28	13,08	8,67	10.955	68,69
Tapanuli Tengah	66,66	12,65	8,28	9.852	67,96
Tapanuli Utara	67,86	13,65	9,46	11.407	72,38
Toba Samosir	69,36	13,25	10,10	11.846	73,87
Labuhan Batu	69,44	12,59	9,01	10.760	71,00
Asahan	67,57	12,53	8,46	10.477	69,10
Simalungun	70,53	12,71	8,95	11.055	71,83
Dairi	68,13	13,06	8,90	10.395	70,36
Karo	70,77	12,71	9,54	12.059	73,53
Deli Serdang	71,11	12,90	9,70	11.891	73,94
Langkat	67,94	12,72	8,51	10.784	69,82
Nias Selatan	68,00	11,98	4,95	6.792	59,85
Humbahas	68,41	13,24	9,10	7.412	67,30
Pakpak Barat	65,05	13,82	8,47	7.913	66,25
Samosir	70,68	13,43	8,95	8.163	69,43
Serdang Bedagai	67,79	12,55	8,35	10.551	69,16
Batu Bara	66,10	12,49	7,83	10.084	67,20
Paluta	66,58	12,41	8,93	9.737	68,34
Padang Lawas	66,50	12,99	8,43	8.445	66,82
Labuhanbatu Selatan	68,14	12,95	8,70	10.892	70,48
Labuhanbatu Utara	68,91	12,79	8,34	11.510	70,79
Nias Utara	68,77	12,57	6,08	5.835	60,57
Nias Barat	68,28	12,61	5,78	5.594	59,56
Kota Sibolga	68,05	13,12	9,87	11.221	72,28
Kota Tanjung Balai	62,28	12,44	9,14	10.778	67,41
Kota P. Siantar	72,63	14,01	11,06	12.106	77,54
Kota Tebing Tinggi	70,28	12,66	10,09	12.055	73,90
Kota Medan	72,40	14,45	11,25	14.613	79,98
Kota Binjai	71,75	13,58	10,58	10.487	74,65
Kota P. Sidempuan	68,41	14,50	10,56	10.464	73,81
Kota Gunung Sitoli	70,42	13,69	8,40	7.300	67,68
SUMATERA UTARA	68,37	13,10	9,25	10.036	70,57

Lampiran 5.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, 2016

Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup (tahun)	Harapan Lama Sekolah (tahun)	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (ribu rupiah)	IPM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nias	69,07	12,09	4,92	6.408,50	59,75
Mandailing Natal	61,98	12,78	7,89	9.236,74	64,66
Tapanuli Selatan	64,34	13,07	8,35	10.820,70	68,22
Tapanuli Tengah	66,69	12,87	8,03	9.693,62	67,74
Tapanuli Utara	67,85	13,61	9,32	11.241,66	72,04
Toba Samosir	69,24	13,19	10,09	11.686,81	73,60
Labuhan Batu	69,46	12,57	8,78	10.558,53	70,52
Asahan	67,47	12,52	8,33	10.288,28	68,70
Simalungun	70,44	12,70	8,86	10.854,69	71,49
Dairi	68,08	12,84	8,70	10.190,21	69,67
Karo	70,82	12,65	9,51	11.925,80	73,34
Deli Serdang	71,20	12,69	9,68	11.682,99	73,57
Langkat	67,93	12,71	8,18	10.566,81	69,20
Nias Selatan	68,16	11,97	4,65	6.647,48	59,28
Humbahas	68,40	13,21	8,91	7.134,09	66,63
Pakpak Barat	65,25	13,81	8,46	7.641,63	65,95
Samosir	70,86	13,42	8,94	7.813,16	69,00
Serdang Bedagai	67,67	12,54	8,34	10.245,81	68,78
Batu Bara	66,10	12,34	7,75	9.886,50	66,75
Paluta	66,60	12,30	8,92	9.599,12	68,09
Padang Lawas	66,61	12,92	8,41	8.093,78	66,33
Labuhanbatu Selatan	68,11	12,94	8,69	10.712,25	70,27
Labuhanbatu Utara	68,90	12,54	8,33	11.278,15	70,31
Nias Utara	68,69	12,41	6,07	5.770,43	60,24
Nias Barat	68,24	12,60	5,77	5.391,53	59,09
Kota Sibolga	68,00	13,11	9,86	11.033,86	72,06
Kota Tanjung Balai	62,40	12,41	9,13	10.575,48	67,25
Kota P. Siantar	72,89	14,00	10,75	11.877,79	77,10
Kota Tebing Tinggi	70,24	12,65	10,07	11.747,04	73,59
Kota Medan	72,38	14,06	11,18	14.392,29	79,36
Kota Binjai	71,79	13,56	10,28	10.342,53	74,17
Kota P. Sidempuan	68,37	14,49	10,48	10.197,96	73,42
Kota Gunung Sitoli	70,39	13,66	8,20	6.963,48	66,87
SUMATERA UTARA	68,33	13,00	9,12	9.744,07	70,00

Lampiran 6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, 2015

Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup (tahun)	Harapan Lama Sekolah (tahun)	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (ribu rupiah)	IPM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nias	68,97	11,77	4,76	6.234	58,85
Mandailing Natal	61,58	12,77	7,63	9.096	63,99
Tapanuli Selatan	63,74	13,06	8,27	10.623	67,63
Tapanuli Tengah	66,59	12,40	8,02	9.555	67,06
Tapanuli Utara	67,55	13,19	9,31	11.079	71,32
Toba Samosir	69,14	13,18	10,08	11.535	73,40
Labuhan Batu	69,36	12,57	8,75	10.356	70,23
Asahan	67,37	12,49	8,32	10.067	68,40
Simalungun	70,34	12,69	8,80	10.728	71,24
Dairi	67,78	12,80	8,69	9.708	69,00
Karo	70,62	12,22	9,50	11.800	72,69
Deli Serdang	71,00	12,52	9,48	11.359	72,79
Langkat	67,63	12,70	7,92	10.364	68,53
Nias Selatan	67,66	11,96	4,64	6.454	58,74
Humbahas	68,10	13,15	8,90	6.889	66,03
Pakpak Barat	64,85	13,80	8,45	7.496	65,53
Samosir	70,26	13,41	8,84	7.698	68,43
Serdang Bedagai	67,47	12,31	8,08	10.110	68,01
Batu Bara	65,80	11,96	7,74	9.692	66,02
Paluta	66,50	11,87	8,91	9.363	67,35
Padang Lawas	66,31	12,91	8,40	7.955	65,99
Labuhanbatu Selatan	68,09	12,73	8,68	10.319	69,67
Labuhanbatu Utara	68,70	12,12	8,31	11.201	69,69
Nias Utara	68,59	12,40	6,06	5.627	59,88
Nias Barat	67,94	12,33	5,74	5.207	58,25
Kota Sibolga	67,70	13,10	9,85	10.765	71,64
Kota Tanjung Balai	61,90	12,40	9,12	10.326	66,74
Kota P. Siantar	72,29	13,99	10,73	11.388	76,34
Kota Tebing Tinggi	70,14	12,23	10,06	11.393	72,81
Kota Medan	72,28	13,97	11,00	14.191	78,87
Kota Binjai	71,59	13,56	10,28	10.098	73,81
Kota P. Sidempuan	68,32	14,48	10,47	9.668	72,80
Kota Gunung Sitoli	70,29	13,65	8,18	6.742	66,41
SUMATERA UTARA	68,29	12,82	9,03	9.563	69,51

Lampiran 7.

**PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan
(ADHK) Menurut Kabupaten/kota, 2015-2019
(Ribu Rupiah)**

Kabupaten/Kota (1)	2015 (2)	2016 (3)	2017 (4)	2018 (5)	2019 (6)
Nias	15.487,17	16.173,86	16.898,38	17.567,54	18.469,48
Mandailing Natal	17.340,04	18.224,39	19.149,94	20.077,43	20.962,97
Tapanuli Selatan	28.753,43	30.028,96	31.401,97	32.830,96	34.347,62
Tapanuli Tengah	16.394,41	16.900,84	17.454,37	18.040,73	18.648,17
Tapanuli Utara	16.596,78	17.151,46	17.731,9	18.374,59	19.102,5
Toba Samosir	25.327,82	26.387,07	27.514,87	28.741,53	29.966,81
Labuhan Batu	41.283,79	42.604,78	43.979,26	45.453,76	47.012,83
Asahan	29.898,39	31.293,96	32.732,37	34.297,06	35.962,47
Simalungun	26.258,51	27.512,31	28.764,98	30.098,90	31.510,55
Dairi	19.397,86	20.271,73	21.175,18	22.131,90	23.108,41
Karo	30.495,90	31.505,12	32.603,23	33.548,97	34.568,50
Deli Serdang	28.932,85	29.837,90	30.734,44	31.703,57	32.735,98
Langkat	24.000,36	25.003,53	26.085,04	27.207,87	28.410,91
Nias Selatan	11.370,11	11.755,68	12.187,27	12.688,06	13.194,78
Humbahas	18.617,32	19.344,29	20.122,04	20.936,54	21.773,93
Pakpak Barat	14.883,40	15.474,46	16.119,21	16.729,55	17.416,97
Samosir	20.226,18	21.171,50	22.197,19	23.301,47	24.556,54
Serdang Bedagai	26.026,25	27.264,69	28.578,47	29.972,08	31.462,55
Batu Bara	50.560,54	52.260,90	53.861,51	55.687,75	57.620,64
Paluta	26.123,86	27.119,75	28.068,89	29.096,51	30.172,58
Padang Lawas	24.579,29	25.498,07	26.353,88	27.353,49	28.300,86
Labuhanbatu Selatan	48.726,62	50.216,52	51.732,84	53.459,82	55.313,13
Labuhanbatu Utara	40.186,53	41.874,82	43.618,78	45.475,60	47.439,33
Nias Utara	14.594,22	15.138,64	15.684,40	16.263,60	16.905,75
Nias Barat	12.069,74	12.597,77	13.125,66	13.642,67	14.264,13
Kota Sibolga	33.670,92	35.293,31	37.025,80	38.868,88	40.745,04
Kota Tanjung Balai	27.765,75	29.006,56	30.229,20	31.584,35	33.045,71
Kota P. Siantar	32.304,02	33.589,60	34.790,06	36.174,30	37.646,29
Kota Tebing Tinggi	20.631,32	21.401,55	22.251,50	23.130,04	24.050,96
Kota Medan	56.214,87	59.236,74	62.177,48	65.369,67	68.766,61
Kota Binjai	24.826,32	25.888,50	26.979,96	28.144,64	29.405,72
Kota P. Sidempuan	16.464,77	17.081,17	17.731,90	18.451,72	19.210,09
Kota Gunung Sitoli	19.948,26	20.889,51	21.891,89	22.940,74	24.071,79
Kabupaten/Kota SUMATERA UTARA	31.769,02	33.127,04	34.491,94	35.955,11	37.048,91



Sensus
Penduduk
2020

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

— Enlighten The Nation —



**BADAN PUSAT STATISTIK
Kabupaten Tapanuli Utara**

Jl. Sutan Sumurung No. 7 Tarutung
Telp. (0633)21153 Fax. (0633) 21755
Homepage. <http://tapanuliutarakab.bps.go.id>
Email. tapanuliutarakab@bps.go.id